

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

**ANALISIS GAMBARAN PERKEMBANGAN PESERTA KB BARU (PB) MKJP
TERHADAP KKP (KONTRAK KINERJA PROVINSI) PB MKJP DI
PROVINSI JAWA TIMUR BULAN JANUARI-JULI TAHUN 2019**



**OLEH :
WEIKE RETNO PALUPI
NIM. 101711123002**

**DEPARTEMEN BIostatistika dan Kependudukan
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

**LAPORAN PELAKSAAN MAGANG
DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :

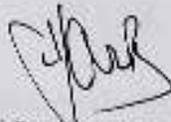
WEIKE RETNO PALUPI

NIM. 101711123002

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :

Pembimbing Departemen,

Tanggal 4 - 11 - 2019



Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
NIP. 19650623 199203 1 002

Pembimbing di BKKBN Prov. Jawa Timur

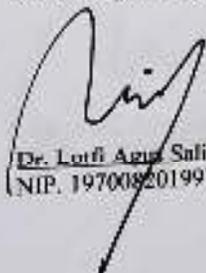
Tanggal 7 - 11 - 2019



Nur Hotimah, S.Sos
NIP. 19750418 199903 2 004

Mengetahui,
Ketua Departemen Biostatistika dan Kependudukan

Tanggal 4 - 11 - 2019



Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si
NIP. 197008201997021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Magang di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Basuki N., dr., M.Kes selaku dosen pembimbing magang dan Ibu Nur Hotimah, S.Sos selaku pembimbing instansi yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan arahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan magang di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si selaku Ketua Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
3. Dr. Rachmah Indrawati, SKM., MKM selaku Koordinator Magang Departemen Biostatistika dan Kependudukan.
4. Dra. Maria Ernawati, M.M selaku Kepala Bidang Adokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
5. Ibu Nur Hotimah, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi serta Pembimbing Instansi di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
6. Seluruh staf bidang ADPIN yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses magang di bagian ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
7. Seluruh staf di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
8. Teman-teman seperjuangan magang Departemen Biostatistik dan Kependudukan serta Departemen PKIP
9. Teman-teman Alih Jenis FKM 2017 Universitas Airlangga
10. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu mensupport dan memotivasi sehingga pelaksanaan magang ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan penulisan laporan berikutnya. Semoga dengan adanya laporan ini akan bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang memanfaatkannya.

Surabaya , 14 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.5.1 Tujuan Umum	2
1.5.2 Tujuan Khusus	2
1.6 Manfaat Penelitian	2
1.1.1. Bagi Mahasiswa	2
1.1.2. Bagi Fakultas	3
1.1.3. Bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	3
BABII TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Keluarga Berencana	4
2.1.1 Definisi Keluarga Berencana.....	4
2.1.2 Tujuan Keluarga Berencana	4
2.13 Manfaat Keluarga Berencana	5
2.1.4 Metode Kontrasepsi.....	6
2.2 Peserta KB Baru (PB).....	13
BABIII METODE KEGIATAN	14
3.1 Lokasi Magang.....	14
3.2 Waktu Pelaksanaan Magang	14
3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan Magang	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data	15
3.5 Pengolahan Data	15
BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN	16

4.1	Gambaran Umum BKKBN	16
4.1.1.	Sejarah BKKBN	16
4.1.2.	Visi dan Misi BKKBN	17
4.1.3.	Landasan Hukum BKKBN	17
4.1.4.	Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi	18
4.1.5.	Struktur Organisasi BKKBN	19
4.1.6.	Filosofi dan Grand Strategy	25
4.2	Hasil Analisis Data.....	27
4.2.1.	Gambaran Peserta KB Baru (PB) MKJP Periode Bulan Januari-Juli 2019	27
4.2.2.	Perkembangan Peserta KB Baru (PB) MKJP Per Metode Periode Januari-Juli 2019	28
4.2.3.	Gambaran Peserta KB Baru (PB) Terhadap KKP Per Bulan Periode Januari-Juli 2019	29
4.3.	Identifikasi Masalah	34
4.4.	Pemecahan Masalah	37
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	38
5.1.	Kesimpulan	38
5.2.	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....		39
LAMPIRAN		41

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jadwal Kegiatan Magang di BKKBN Provinsi Jawa Timur	14
4.2	Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) PB MKJP Kabupaten/Kota di Jawa Timur	30
4.3	Hasil Pencapaian Peserta KB Baru (PB) MKJP Kabupaten/Kota Terhadap KKP PB MKJP Jawa Timur Bulan Januari-Juli Tahun 2019	35

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Metode Kontrasepsi IUD Jenis Coppet-T.....	7
2.2	Metode Kontrasepsi IUD Jenis Progestasert IUD (Copper-7).....	7
2.3	Metode Kontrasepsi IUD Jenis Multiload	8
2.4	Metode Kontrasepsi IUD Jenis Lippes Loop	8
4.5	Gafik Peserta Baru (PB) Seluruh Metode MKJP Periode Bulan Januari-Juli 2019 di Jawa Timur	27
4.6	Grafik Hasil Pelayanan Peserta KB Baru (PB) MKJP di Jawa Timur Bulan Januari-Juli 2019	28
4.7	Perkembangan Peserta KB Baru (PB) Per Metode MKJP Setiap Bulan Periode Januari-Juli 2019	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,49% pertahun. Dampak dari adanya ledakan jumlah penduduk ini adalah munculnya berbagai masalah sosial. Untuk itu pemerintah secara aktif telah melakukan program penekanan jumlah penduduk menggunakan kontrasepsi, yaitu dengan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1968. Pada periode ini pemerintah lebih banyak berinisiatif dan partisipasi masyarakat sangat rendah, sehingga masih terdapat unsure pemaksaan dalam menggunakan alat kontrasepsi.

Program Keluarga Berencana (KB) ini bertujuan untuk membentuk Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Kesejahteraan keluarga merupakan suasana tingkat keserasian pemenuhan kebutuhan keluarga secara menyeluruh, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan kecerdasan, dan kebutuhan rasa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yang dimaksud dengan program Keluarga Berencana adalah suatu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sejalan dengan peraturan tersebut, program KB merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kematian ibu melalui penapisan kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran).

Dari masalah tersebut, pemerintah membentuk suatu badan yang spesifik dan khusus bertanggung jawab pada pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diresmikan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1970 (Irianto, 2014).

Salah satu metode kontrasepsi yang digunakan adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan suatu metode kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari dua tahun. Kontrasepsi yang tergolong dalam MKJP antara lain IUD, MOW, MOP, dan Implan. Penggunaan MKJP masih tergolong rendah yaitu berkisar antara 3-4%. Di Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli

2019, berdasarkan laporan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, pencapaian peserta KB baru MKJP sebesar 112.816 peserta atau sekitar 57,74% dari KKP (Kontrak Kinerja Provinsi) yang ditetapkan yaitu sebesar 195.402 peserta baru. Pada beberapa wilayah kabupaten/kota dengan pencapaian peserta KB baru MKJP yang masih berada dibawah target dari Provinsi Jawa Timur, terutama pada metode KB MKJP untuk pria, yaitu MOP, yang masih terdapat beberapa wilayah dengan pencapaian 0,00%.

Rendahnya angka penggunaan MKJP ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang MKJP. Sehingga akan memunculkan berbagai stigma tentang prosedur pelaksanaan MKJP yang kurang tepat dimasyarakat.

1.2. Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Memperoleh pengalaman, keterampilan, penyesuaian sikap, dan penghayatan pengetahuan di lingkungan kerja dalam rangka memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidang ilmu kesehatan masyarakat, serta melatih kerja sama dengan anggota tim.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari perkembangan peserta KB baru (PB) MKJP di Jawa Timur bulan Januari-Juli tahun 2019.
2. Mempelajari perkembangan peserta KB baru (PB) MKJP per metode di Jawa Timur bulan Januari-Juli tahun 2019
3. Menganalisis peserta KB baru (PB) MKJP terhadap KKP di Jawa Timur bulan Januari-Juli tahun 2019.

1.3. Manfaat

1.3.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar menganalisis gambaran perkembangan peserta KB baru (PB) metode MKJP dengan KKP PB MKJP Provinsi Jawa Timur di Perwakilan BKKBN Jawa Timur serta memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pada dunia kerja khususnya pada proses pelaporan dan analisis data pencapaian peserta KB baru (PB) MKJP di Perwakilan BKKBN Jawa Timur.

1.3.2. Manfaat bagi Fakultas

1. Menambah kepustakaan maupun data pendahuluan di bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi
2. Terjalin kerja sama dan/atau hubungan baik antara kedua belah pihak yaitu fakultas dengan instansi tempat magang
3. Fakultas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman magang.

1.3.3. Manfaat Bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

1. Laporan yang diajukan kepada Perwakilan BKKBN Jawa Timur diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan maupun program selanjutnya.
2. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara Perwakilan BKKBN Jawa Timur dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keluarga Berencana

2.1.1. Definisi Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan suatu usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga (Purwoastuti & Walyani, 2014). Menurut Undang-Undang nomor 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan, menyatakan Keluarga Berencana adalah upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Menurut WHO pada *Expert Commite* tahun 1970, Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri (pasutri) untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk menjarangkan, mengatur, atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi.

2.1.2. Tujuan Keluarga Berencana

Terdapat dua tujuan dalam program Keluarga Berencana (KB), yaitu :

- a. Tujuan umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
- b. Tujuan khusus, yaitu meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi dan kesehatan keluarga berencana dengan cara pengaturan jarak kelahiran.

Kesimpulan dari tujuan KB tersebut adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan permintaan KB dan KR (Kesehatan Reproduksi) yang berkualitas, termasuk

upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi (Anggainsi & Martini, 2012).

Sedangkan tujuan Keluarga Berencana berdasarkan RENSTRA tahun 2005-2009 diantaranya meliputi :

1. Keluarga dengan anak ideal
2. Keluarga sehat
3. Keluarga berpendidikan
4. Keluarga sejahtera
5. Keluarga berketahanan
6. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
7. Penduduk tumbuh seimbang (PTS)

2.1.3. Manfaat Keluarga Berencana

Manfaat yang didapatkan oleh pasangan suami istri dalam menggunakan KB antara lain adalah :

1. Menurunkan risiko pada kehamilan
Alat kontrasepsi dapat berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan ker_KB keluarga dapat merencanakan dan mengatur kelahiran anak dengan menghindari “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak). Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan akan menurunkan risiko kematian ibu.
2. Menurunkan risiko kanker pada wanita
Kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita seperti jenis pil, suntik, atau implant mengandung progesterone dan estrogen yang dapat membantu wanita mengendalikan kehamilan dan menurunkan risiko kanker pada system reproduksinya. Kanker yang dapat dicegah adalah kanker indung telur (ovarium) dan kanker dinding rahim (endometrium).
3. Menurunkan risiko radang panggul
4. Menurunkan angka kematian ibbu dan bayi
Kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan dapat memperbesar peluang untuk terjadinya komplikasi kehamilan dan kelahiran, yang dapat menyebabkan kematian ibu. Beberapa risiko komplikasi yang dihadapi oleh wanita hamil di usia muda antara lain adala infeksi, perdarahan hebat, anemia,

dan eklampsia. Hal ini terjadi karena tubuh ibu hamil berusia muda belum matang secara fisik maupun biologis.

Wanita hamil dan melahirkan di usia dini juga merisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi premature, lahir dengan berat badan rendah (BBLR), serta kekurangan gizi. Hal tersebut terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya yang sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup akan terhambat atau gagal berkembang di dalam kandungan. Oleh sebab itu, wanita yang hamil dan melahirkan pada usia dini akan mempunyai risiko kematian bayi yang lebih tinggi.

5. Meningkatkan keharmonisan keluarga

Dengan ber-KB, ibu mempunyai kesempatan dan waktu luang dalam memperhatikan dan merawat diri sendiri, sehingga dapat mengurus, merawat, mendidik, serta merawat keluarga menjadi lebih baik dan harmonis tanpa rasa takut hamil, dan mendiskusikan semua permasalahan dengan suami.

6. Tidak mengganggu perkembangan anak

Pengaturan jarak kehamilan membuat seorang anak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan perhatian dan kasih sayang orangtua, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Dengan ber-KB, ibu dapat memperhatikan pemenuhan gizi yang diperoleh oleh anak dan seluruh keluarga.

2.1.4. Metode Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang artinya melawan dan “konsepsi” yang artinya pembuahan. Sehingga, kontrasepsi berarti mencegah bertemunya sperma dengan ovum, sehingga tidak terjadi pembuahan yang mengakibatkan kehamilan. Pada prinsipnya, metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (ovum) atau yang disebut fertilisasi, atau mencegah sel telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melakukan perlekatan) dan berkembang di dalam rahim. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi, antara lain yaitu :

1. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

1) IUD (*Intra Uterine Device*)

Pengertian IUD adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik lentur, mempunyai lilitan tembaga atau juga mengandung hormon dan

dimasukkan kedalam kavum uteri (rahim) sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilisasi, dan menyulitkan telur untuk berimplentasi dalam uterus. IUD memiliki bentuk yang bermacam-macam, terdiri dari plastik (polythylene), ada yang dililit tembaga (Cu) ada pula yang tidak, tetapi ada pula yang dililit dengan tembaga campur perak (Ag). Selain itu ada pula yang batangnya berisi hormone progesterone. Jenis-jenis IUD yang digunakan antara lain adalah :

a) Copper-T

Copper-T terbuat dari bahan polyethilen dimana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan tembaga halus ini mempunyai efek anti fertilitas (anti pembuahan) yang cukup baik. Spiral jenis Copper-T mencegah kehamilan dengan cara mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun.



Gambar 2.1 Metode Kontrasepsi IUD Jenis Copper-T

b) Progestasert IUD

Progestasert IUD melepaskan progesterone dan hanya efektif untuk 1 tahun, serta dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. IUD ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertical 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 200 mm², fungsinya sama dengan lilitan tembaga halus pada IUD Copper-T.



Gambar 2.2 Metode Kontrasepsi IUD Jenis Progestasert IUD (Copper-7)

c) Multi load

IUD ini terbuat dari plastik (polyethelene) dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Panjang dari ujung atas ke ujung bawah 3,6 cm. batang diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm^2 atau 375 mm^2 untuk menambah efektivitas.



Gambar 2.3 Metode Kontrasepsi IUD Jenis Multiload

d) Lippes loop

IUD ini terbuat dari polyethelene, berbentuk huruf spiral atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan control, dipasang benang pada ekor Lippes Loop. Lippes Loop mempunyai angka kegagalan yang rendah. Keuntungan dari pemakaian IUD jenis ini adalah bila terjadi perforasi, jarang menyebabkan luka atau penyumbatan usus, sebab terbuat dari bahan plastik.



Gambar 2.4 Metode Kontrasepsi IUD Jenis Lippes Loop

Keuntungan pemakaian IUD antara lain adalah :

- a. Sebagai kontrasepsi, efektifitasnya tinggi (1 kegagalan dalam 125-170 kehamilan)
- b. Dapat efektif segera setelah pemasangan
- c. Merupakan metode kontrasepsi jangka panjang
- d. Tidak tergantung pada daya ingat
- e. Tidak mempengaruhi hubungan seksual
- f. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan
- g. Membantu mencegah kehamilan di luar kandungan (kehamilan ektopik)
- h. Tidak ada efek samping hormonal seperti kenaikan berat badan, flek pada kulit, serta flek diantara haid (spotting)

Kerugian setelah pemasangan IUD, beberapa ibu kemungkinan akan mengeluh merasakan nyeri dibagian perut dan perdarahan sedikit-sedikit, namun tidak berjalan lama, yaitu sekitar 3 bulan setelah pemasangan. Pengguna KB IUD harus segera memeriksakan diri ke klinik apabila mengalami :

- a. Mengalami keterlambatan haid yang disertai tanda-tanda kehamilan (mual, pusing, muntah).
- b. Terjadi perdarahan yang lebih banyak dari haid biasanya
- c. Terdapat tanda-tanda infeksi, misalnya keputihan, suhu badan meningkat, menggigil, atau jika ibu merasa tidak sehat.
- d. Sakit pada perut, misalnya pada saat melakukan senggama.

2) MOW (Metode Operasi Wanita)

Metode Operasi Wanita disebut juga tubektomi, merupakan metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi, dengan cara mengoklusi tuba falopii (mengikat dan memotong atau memasang cincin), sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Waktu penggunaan metode MOW dapat dilakukan idealnya 48 jam pasca persalinan, segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar, atau bila tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, dapat ditunda 4-6 minggu. Sebelum melakukan tubektomi, terlebih dahulu calon peserta (akseptor) harus melakukan konseling dengan tim medis dan tim medis atau konselor harus menyampaikan informasi yang lengkap dan objektif tentang metode MOW. Terdapat 2 jenis tipe MOW yang digunakan dalam pelayanan MOW dengan menggunakan teknik anestesi local, yaitu :

- a. Minilaparotomi

Merupakan metode pengambilan tuba yang dilakukan melalui sayatan kecil (sekitar 3 cm) baik pada daerah bawah perut (suprapubik) maupun pada lingkaran pusat bawah (sub umbilical), baik dilakukan pada masa interval maupun pascapersalinan. Setelah tuba di dapat, kemudian dikeluarkan, diikat, dan dipotong sebagian. Setelah itu dinding perut ditutup kembali. tindakan tersebut relative lebih murah, aman, dan efektif.

b. Laparoskopi

Prosedur laparoskopi membutuhkan tenaga spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang telah dilatih secara khusus agar pelaksanaannya aman dan efektif. Dapat dilakukan antara 6-8 minggu pascapersalinan atau abortus. Laparoskopi digunakan untuk jumlah pasien yang memadai karena peralatan dan biaya pemeliharaan cukup mahal.

3) MOP (Metode Operasi Pria)

Metode Operasi Pria atau disebut juga Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi vasa deferensia, sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi.

Jenis-jenis MOP atau vasektomi antara lain adalah :

- a. Vasektomi tanpa pisau (VTP atau No scalpel vasectomy)
- b. Vasektomi dengan insisi skrotum (tradisional)
- c. Vasektomi semi permanen, yakni jenis vas deferens yang diikat dan bisa dibuka kembali untuk berfungsi secara normal, dan tergantung pada lama tidaknya pengikatan vas deferens, karena semakin lama vasektomi diikat maka keberhasilan semakin kecil. Sebab vas deferens yang sudah lama tidak dilewati oleh sperma akan menganggap sperma adalah benda asing sehingga akan menghancurkan benda asing tersebut.

Keuntungan metode jenis MOP adalah efektivitasnya tinggi yaitu sekitar 99,6-99,8 %, sangat aman sehingga tidak ditemukan efek samping jangka panjang, morbiditas dan mortalitas jarang, hanya sekali aplikasi dan efektif dalam jangka panjang, serta tingkat efisiensi biaya dan lamanya penggunaan kontrasepsi lebih tinggi.

4) Implan

Implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon polidimetil. Cara kerja implan yaitu

dengan cara menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sel sperma tidak mudah masuk ke dalam rahim, serta menipiskan endometrium sehingga tidak siap untuk nidasi.

Jenis-jenis implan terdiri dari :

- a. Norplant : terdiri dari 6 kapsul silastik dimana tiap kapsul mengandung levonogestrel sebanyak 36 mg.
- b. Implanon : terdiri dari 1 kapsul silastik berisi 68 mg 3-ketodesogestrel dan 66 mg kopolimer EVA
- c. Jadena : terdiri dari 2 kapsul silastik berisi levonogestrel 75 mg.

Keuntungan dalam penggunaan kontrasepsi implan adalah :

- a. Implan memberikan perlindungan kontrasepsi jangka panjang (sampai 5 tahun), pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan,
- b. Sangat efektif yaitu dengan kegagalan 0,2-1,0 kehamilan per 100 perempuan,
- c. Bebas dari pengaruh estrogen,
- d. Tidak mengganggu kegiatan senggama,
- e. Tidak mengganggu ASI.

Keuntungan non-kontrasepsi dari metode implan yaitu :

- a. Dapat mengurangi nyeri haid serta mengurangi jumlah darah haid
- b. Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul
- c. Menurunkan angka kejadian endometriosis.

2. Metode Non MKJP

a. Pil KB

Kontrasepsi pil merupakan kontrasepsi hormonal yang berbentuk oral yang berisi hormon estrogen dan atau hormon progesterone. Fungsi utama dari hormone estrogen adalah menghambat pematangan sel telur dan menghambat terjadinya ovulasi, sedangkan fungsi utama hormone progesterone adalah sebagai pengental cairan/lendir yang berada pada mulut rahim. Dengan mengentalnya lendir tersebut maka sperma akan susah memasuki rahim dan menghambat terjadinya pembuahan. Efek samping dari penggunaan pil KB ini adalah bisa terjadi mual, muntah, gangguan lambung dan usus, perdarahan, perubahan payudara, perubahan berat badan dan lain-lain. Jenis-jenis kontrasepsi pil antara lain yaitu :

- 1) Pil Oral Kombinasi (POK)

Pil oral kombinasi adalah pil kontrasepsi yang mencegah terjadinya ovulasi dan mempunyai efek lain terhadap traktus genitalis, seperti menimbulkan perubahan-perubahan pada lendir serviks, pada motilitas tuba fallopi dan uterus. POK terdapat berbagai jenis, antara lain jenis monofasik, bifasik, dan trifasik.

2) Mini Pil

Mini Pil adalah pil kontrasepsi yang hanya mengandung hormone progesterin saja tanpa hormone estrogen. Dosis progesterin dalam mini pil hanya 0,5 mg atau kurang. Efek utama pada penggunaan mini pil adalah terhadap lendir serviks, dan endometrium sehingga nidasi blasto kista tidak dapat terjadi. Pada umumnya mini pil tidak digunakan untuk kontrasepsi. Terdapat 2 jenis mini pil, yaitu jenis dengan kemasan isi 35 pil yang terdiri dari 300 mg levonogestrel atau 350 mg neotindome, dan jenis kemasan isi 28 pil yang terdiri dari 75 mg norgestrel.

3) Morning After Pill (*Post Coital Pill*)

Morning after pill adalah pil atau obat yang harus dimulai dalam waktu beberapa jam atau diberikan esok paginya setelah bersenggama. Kontrasepsi ini bertujuan untuk mencegah nidasi karena suatu hubungan seks tanpa pengamana dimasa usia subur seorang wanita. Morning after pill hanya akan efektif jika diminum paling lama 120 jam atau 5 hari sejak hubungan seks. Morning after pill terdiri atas 2 buah tablet. Tablet pertama diminum maksimal 120 jam sejak berhubungan seks tanpa pengaman, kemudian disusul tablet kedua maksimal 12 jam setelah tablet pertama. Terdapat 3 macam jenis metode kontrasepsi Morning after pill, yaitu pil oral kombinasi, estrogen dosis tinggi per oral, serta progesterin dosis tinggi.

b. Suntik

Metode kontrasepsi suntik adalah suatu metode atau cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Cara kerja metode kontrasepsi suntik dalam mencegah kehamilan yaitu dengan cara menghalangi ovulasi (masa subur), mengubah lendir serviks (vagina) menjadi kental, menghambat sperma dan menimbulkan perubahan pada rahim, mencegah terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma, serta mengubah kecepatan

transportasi sel telur. Adapun jenis-jenis KB suntik yang digunakan di Indonesia antara lain yaitu :

1. Suntikan 1 bulan, misalnya Cyclofem yang mengandung 25 mg Progesteron Asetat dan 5 mg estrogen Sipionat, yang diberikan setiap bulan.
2. Suntikan 3 bulan, misalnya Depo provera dan Depogeston yang diberikan setiap 3 bulan sekali.

c. Kondom

Kondom merupakan metode kontrasepsi yang berupa suatu kantong karet tipis, berwarna atau tidak berwarna, yang digunakan untuk menutupi penis yang ereksi sebelum dimasukkan ke dalam vagina, sehingga sperma tertampung di dalamnya dan tidak masuk di dalam vagina, dengan demikian dapat mencegah terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Kondom terbuat dari bahan karet atau latek yang mampu mencegah pertemuan sel telur dengan sperma saat melakukan hubungan suami istri. Selain itu, metode kondom efektif mampu mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual. Angka kegagalan pada pemakaian metode kontrasepsi kondom berkisar antara 14-15%.

2.2. Peserta KB Baru (PB)

Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara atau alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung pencapaian peserta KB baru adalah :

$$\frac{\text{Jumlah PUS peserta KB baru di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah PUS di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1. Lokasi Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jl. Airlangga no. 31-32, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

3.2. Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019, dengan mengikuti hari dan jam kerja instansi, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu kerja pukul 07.30 – 16.00 (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 – 14.00 (Jumat). Adapun rencana timeline kegiatan magang di BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Magang di BKKBN Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Waktu				
		September				Oktober
		I	II	III	IV	I
1.	Pelaksanaan Magang 1) Orientasi di Lingkungan BKKBN Prov. Jawa Timur dan di salah satu bidang terpilih 2) Mempelajari gambaran umum BKKBN Prov. Jawa Timur 3) Menyusun laporan kegiatan harian					
2.	Penentuan tema laporan magang 1) Mempelajari data dan menganalisis data					
3.	Penyusunan Laporan magang					
4.	Konsultasi dengan Pembimbing instansi					
5.	Konsultasi dengan Dosen pembimbing fakultas					
6.	Supervisi Dosen pembimbing fakultas					
7.	Seminar hasil magang					

3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan Magang

Proses kegiatan magang di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur melibatkan pembimbing magang yang merupakan Plt. Kepala Sub. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) dan staff. Kegiatan magang dilaksanakan dengan metode :

a. Diskusi

Model diskusi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran an informasi secara jelas mengenai kegiatan dan program yang terdapat di bidang ADPIN di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur.

b. Partisipasi

Mahasiswa ikut aktif dalam kegiatan dan aktivitas kerja di bidang ADPIN di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur.

c. Studi literature

Dilakukan untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah data sekunder laporan pengguna baru KB metode MKJP berdasarkan KKP bulan Januari-Juli 2019 di Jawa Timur yang berasal dari Laporan hasil analisis dan evaluasi program KKBPK BKKBN Provinsi Jawa Timur. Data tersebut berasal dari 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

3.5. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh diolah dengan menggunakan Microsoft Excel yang kemudian ditamoilkan dalam bentuk grafik batang untuk diketahui, dianalisis, dan digambarkan proporsinya per metode MKJP.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BKKBN

4.1.1. Sejarah BKKBN

Organisasi Keluarga Berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan tersebut kemudian berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesia Planned Parenthood Federation* (IPPF). PKBI meujudkan keluarga berencana melalui 3 jenis usaha pelayanan yang dilakukan, yaitu mengatur atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta member nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Pada bulan Januari 1967 dilaksanakan Simposium Kontrasepsi di Bandung dan pada tanggal 25 Ferbuari 1967 diadakan Kongres Nasional I PKBI yang berlokasi di Jakarta. Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta mengeluarkan pernyataan bahwa PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana yang telah dijadikan sebagai program pemerintah agar segera dilaksanakan, dan PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 1967, presiden menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran pentingnya merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran sebagai wujud hak asasi manusia. Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dan berstatus sebagai lembaga semi pemerintah.

Pada Periode Pelita II, mulai dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 tahun 1970. Pada tahun

1972 terjadi penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang telah ada melalui Keppres No. 33 tahun 1972. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

4.1.2. Visi dan Misi BKKBN

Visi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan keluarga berkualitas”.

Sedangkan misi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

4.1.3. Landasan Hukum BKKBN

Adapun landasan hukum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional antara lain adalah :

1. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN
2. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dna Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

10. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen
11. Keputusan Presiden No. 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen
12. Keputusan Presiden No. 110 tahun 2001.
13. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2015
14. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No. 10/HK.010/B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BKKBN Pusat
15. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No. 74/HK.010/B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota
16. Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Kedudukan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
17. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Presiden No. 26 tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
19. Keputusan Presiden No. 26 tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional
20. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 tahun 2014 tentang Standart Tariff Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

4.1.4. Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksana tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

4.1.5. Struktur Organisasi BKKBN

Tugas masing-masing bagian atau bidang dalam struktur organisasi di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala adalah seorang pemimpin Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa timur, yang bertugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN di Jawa Timur.

2. Sekretariat

Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program;

- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan, dan bantuan hukum, serta pengelolaan tata laksana; dan
- f. Pemberian dukungan administrasi pengawasan

Bidang Sekretariat terdiri atas beberapa subbagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program.
- d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana.
- e. Subbagian Administrasi Pengawasan, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi pengawasan.

3. Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas : melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan; dan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas beberapa subbagian, yaitu :

- a. Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk.
- b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.
- c. Subbidang Analisis dampak Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.

4. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Tugas : melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus; dan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi terdiri dari :

- a. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta

- b. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
- c. Subbidan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

5. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

Tugas : melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

Fungsi :

- b. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas :

- a. Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan.
- b. Subbidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.

- c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

6. Bidang Advokasi, Penggerakan, Dan Informasi

Tugas : melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan dan informasi

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah; dan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi terdiri atas :

- a. Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

- c. Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

7. Bidang Pelatihan Dan Pengembangan

Tugas : melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Fungsi :

- a. Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian, dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di provinsi;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di provinsi;
- c. Pelaksanaan urusan tata operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Bidang Pelatihan dan Pengembangan terdiri atas beberapa subbidang, antara lain :

- a. Subbidang Tata Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- b. Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerja sama pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- c. Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyelenggaraan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

4.1.6. Filosofi dan Grand Strategy

a. Filosofi

Menggerakkan peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB)

b. Grand Strategy

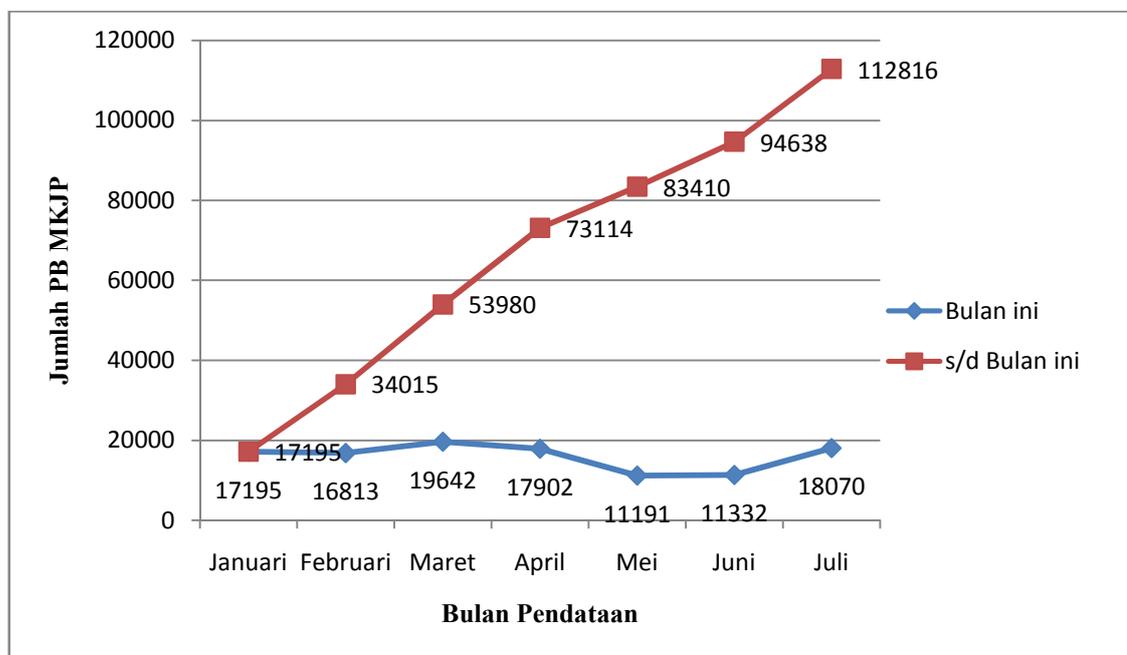
1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program Keluarga Berencana (KB)
2. Menata kembali pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB)
3. Memperkuat SDM operasional Program Keluarga Berencana (KB)
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
5. Meningkatkan pembiayaan Program Keluarga Berencana (KB)



4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1. Gambaran Peserta KB Baru (PB) MKJP Periode Bulan Januari-Juli 2019

Hasil pelayanan KB baru, khususnya metode MKJP, di Jawa Timur mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 tercatat sebanyak 112.816 peserta untuk semua metode MKJP.



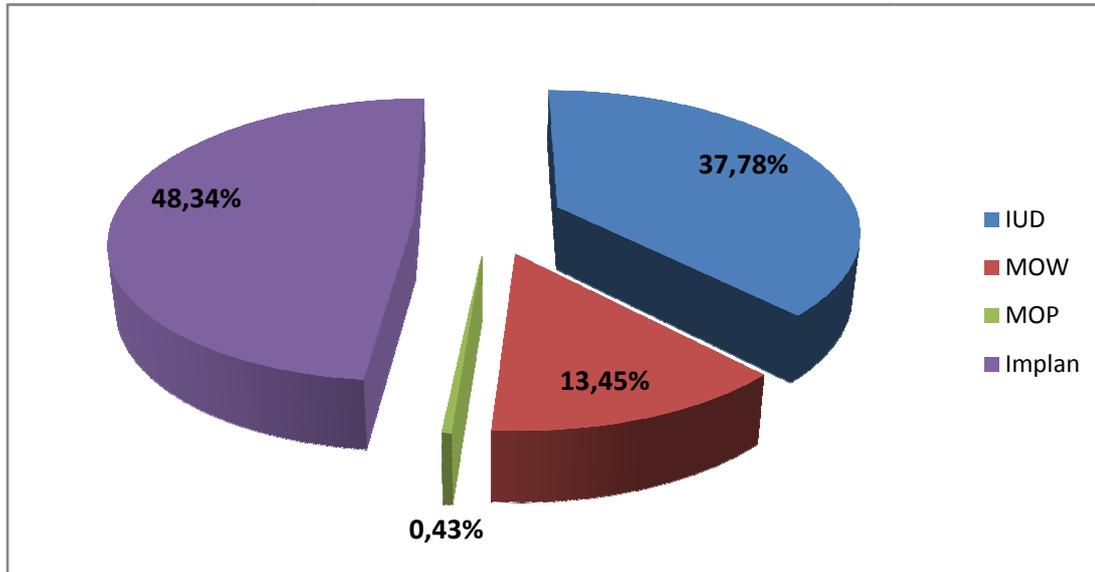
Gambar 4.5 Peserta Baru (PB) Seluruh Metode MKJP Periode Bulan Januari-Juli 2019 di Jawa Timur.

Gambar 4.5 menunjukkan grafik tentang perkembangan jumlah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi jenis MKJP yang terdiri dari metode IUD, MOW, MOP, dan Implan, yang dicatat mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa peserta baru pengguna metode MKJP mengalami peningkatan dan penurunan selama bulan Januari sampai dengan Juli 2019. Terlihat pada gambar, peserta KB baru (PB) MKJP mengalami penurunan pada bulan Mei 2019, yaitu sebanyak 6.711 peserta. Pada bulan Juni ke bulan Juli, PB MKJP mengalami kenaikan jumlah peserta yang signifikan, yaitu sebanyak 11.332 peserta pada bulan Juni menjadi 18.070 peserta pada bulan Juli, atau mengalami kenaikan sebesar 6.738 peserta.

Metode kontrasepsi jangka panjang terdiri dari 4 macam metode, yaitu metode IUD, metode MOW, metode MOP, dan metode Implan. Jumlah pelayanan PB MKJP ini diperoleh melalui pelayanan KB di klinik KB pemerintah maupun swasta, praktik

dokter, serta praktik bidan mandiri. Gambaran mengenai perkembangan pelayanan peserta KB baru (PB) metode MKJP di Jawa Timur bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 dapat dilihat menurut jenis kontrasepsi MKJP yang digunakan.



Gambar 4.6 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru (PB) MKJP di Jawa Timur Bulan Januari-Juli 2019.

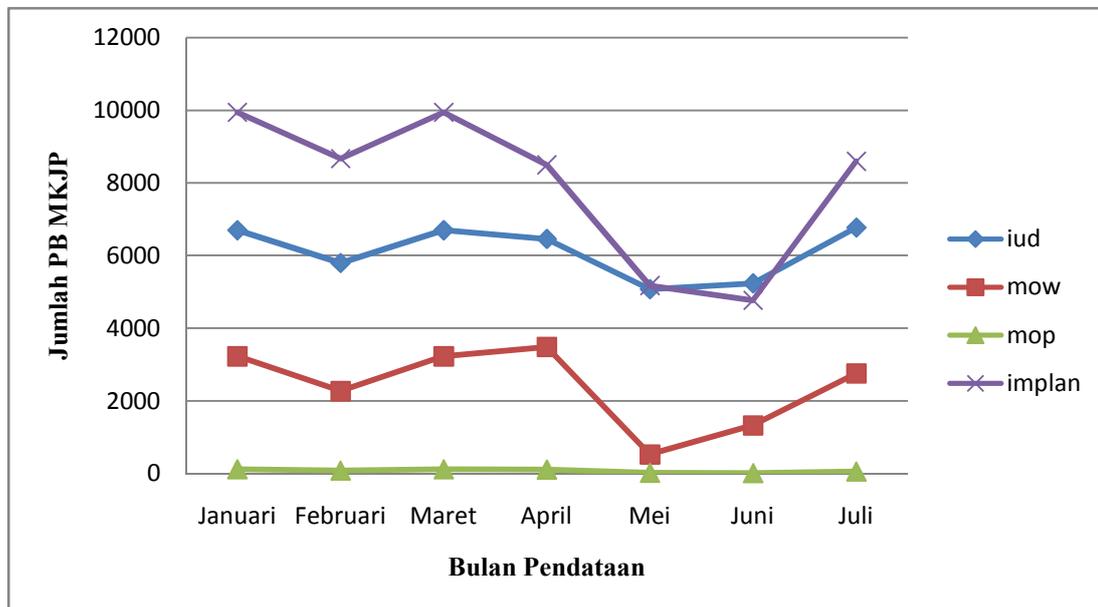
Gambar 4.6 menunjukkan perkembangan hasil pelayanan peserta KB baru (PB) metode MKJP mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2019. Menurut gambar di atas, kontrasepsi jangka panjang yang lebih banyak diminati adalah metode kontrasepsi Implan yaitu sebanyak 48,34% dari seluruh jumlah PB metode MKJP bulan Januari sampai Juli 2019 atau sebanyak 54.536 peserta baru dari 112.816 peserta baru semua metode MKJP. Metode MKJP dengan jumlah peserta baru terbanyak kedua adalah metode kontrasepsi IUD (*Intra Uterine Devices*) yaitu sebanyak 37,78% dari jumlah total PB, atau sebanyak 42.621 peserta dari 112.816 peserta baru MKJP.

Sedangkan metode kontrasepsi MKJP yang kurang diminati adalah metode MOP (Metode Operasi Pria) yaitu hanya sebanyak 0,43% dari 112.816 peserta KB baru, atau sekitar 481 peserta saja.

4.2.2. Perkembangan Peserta KB Baru (PB) MKJP Per Metode Periode Januari-Juli 2019

Perkembangan peserta KB baru metode MKJP apabila dilihat dari banyaknya peserta yang mulai menggunakan metode MKJP yaitu IUD, MOW, MOP, dan Implan

setiap bulan dimulai dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019 dapat dilihat pada grafik gambar berikut ini.



Gambar 4.7 Perkembangan Peserta KB Baru (PB) Per Metode MKJP Setiap Bulan Periode Januari-Juli 2019

Gambar 4.7 diatas menunjukkan perkembangan setiap bulan dimulai dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019 peserta KB baru metode MKJP di Jawa Timur. Dari grafik tersebut, kontrasepsi Implan merupakan kontrasepsi yang paling diminati seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, meskipun jumlah peserta mengalami kenaikan dan penurunan. Metode kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria) merupakan metode yang kurang diminati pada masyarakat, yang dapat dilihat pada grafik perkembangan metode kontrasepsi MOP setiap bulannya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan.

Alasan kurang diminatinya metode kontrasepsi MOP ini bagi akseptor KB pria adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman calon akseptor KB MOP tentang bagaimana prosedur pelaksanaan MOP. Selain itu, masih adanya anggapan dimasyarakat bahwa urusan ber-KB adalah urusan wanita sepenuhnya

4.2.3. Gambaran Peserta KB Baru (PB) MKJP Terhadap KKP Per Bulan Periode Januari-Juli 2019

Pelayanan peserta KB baru (PB) juga dapat dilihat dari pencapaian indikator KKP (Kontrak Kerja Provinsi) yang ditetapkan setiap tahunnya. KKP (Kontrak Kerja

Provinsi) adalah suatu target yang harus dipenuhi oleh provinsi dalam melaksanakan program KB dan telah ditetapkan untuk 1 tahun waktu berjalan. KKP (Kontrak Kinerja Provinsi) tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Berikut ini merupakan KKP sasaran pengguna KB MKJP di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 4.2 Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) PB MKJP Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	KKP PB MKJP	No.	Kabupaten/Kota	KKP PB MKJP
1	Kab. Pacitan	3.227	20	Kab. Magetan	3.056
2	Kab. Ponorogo	5.668	21	Kab. Ngawi	4.792
3	Kab. Trenggalek	2.102	22	Kab. Bojonegoro	10.003
4	Kab. Tulungagung	4.246	23	Kab. Tuban	8.456
5	Kab. Blitar	11.958	24	Kab. Lamongan	5.486
6	Kab. Kediri	11.082	25	Kab. Gresik	4.690
7	Kab. Malang	13.110	26	Kab. Bangkalan	2.050
8	Kab. Lumajang	5.441	27	Kab. Sampang	2.184
9	Kab. Jember	9.056	28	Kab. Pamekasan	2.184
10	Kab. Banyuwangi	11.470	29	Kab. Sumenep	1.704
11	Kab. Bondowoso	3.653	30	Kota Kediri	812
12	Kab. Situbondo	2.769	31	Kota Blitar	1.150
13	Kab. Probolinggo	4.621	32	Kota Malang	5.196
14	Kab. Pasuruan	4.415	33	Kota Probolinggo	1.958
15	Kab. Sidoarjo	7.346	34	Kota Pasuruan	674
16	Kab. Mojokerto	8.498	35	Kota Mojokerto	1.150
17	Kab. Jombang	5.861	36	Kota Madiun	1.954
18	Kab. Nganjuk	7.563	37	Kota Surabaya	9.793
19	Kab. Madiun	4.048	38	Kota Batu	1.976
Jawa Timur					195.402

Sumber : Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.2 menunjukkan KKP untuk semua metode MKJP pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2019. Jumlah KKP pada tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Terlihat pada tabel bahwa KKP peserta KB baru (PB) metode MKJP untuk Provinsi Jawa Timur ada sebesar 195.402 peserta. Dari 38 kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Timur, kabupaten Malang memiliki KKP PB untuk metode MKJP yang tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 13.110 peserta baru semua metode MKJP, sedangkan kabupaten/kota dengan KKP PB MKJP terendah pada tahun 2019 adalah kota Pasuruan.

Pada tabel 4.3 menunjukkan pencapaian indikator peserta KB baru (PB) metode MKJP terhadap KKP PB MKJP bulan Januari 2019, dimana rata-rata KKP PB MKJP Provinsi Jawa Timur adalah 8,80%. Kabupaten/kota dengan capaian PB MKJP terhadap KKP PB MKJP terendah adalah kabupaten Pamekasan dengan KKP PB MKJP sebesar 4,12%, dan kabupaten/kota dengan capaian tertinggi adalah kabupaten Tuban. Pada bulan Februari 2019, target KKP PB MKJP Provinsi Jawa Timur sebesar 17,41%, dengan capaian PB MKJP terhadap KKP PB MKJP tertinggi berada pada kota Pasuruan sebesar 36,50% (246 peserta) serta capaian persentase KKP PB MKJP terendah berada pada kabupaten Sumenep sebesar 6,46% (110 peserta). Pada bulan Maret 2019, capaian KKP PB MKJP Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 27,63% dengan pencapaian tertinggi pada kota Pasuruan sebesar 46,29% dan capaian terendah berada pada kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 13,87% (303 peserta). Pada bulan April 2019, Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata pencapaian KKP PB MKJP sebesar 37,42% atau sebesar 73.114 peserta. Kabupaten/kota dengan pencapaian KKP PB MKJP terendah pada bulan April adalah kabupaten Pamekasan dengan nilai 19,83%, serta kabupaten/kota dengan pencapaian tertinggi tetap berada pada kota Pasuruan yaitu dengan nilai 55,93%. Pada bulan Mei 2019, Jawa Timur mengalami kenaikan capaian KKP PB MKJP yaitu menjadi sebesar 42,69% atau sebesar 83.410 peserta untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Pencapaian terendah diperoleh oleh kabupaten Pamekasan dengan 523 peserta atau sebesar 23,95%, dan pencapaian tertinggi berada pada kota Pasuruan sebesar 435 peserta atau dengan persentase sebesar 64,54%. Sedangkan pada bulan Juni 2019, capaian rata-rata KKP PB MKJP Jawa Timur menjadi sebesar 48,43% dengan capaian tertinggi berada tetap pada kota Pasuruan yaitu sebesar 72,11% dan pencapaian terendah masih pada kabupaten Pamekasan yaitu dengan nilai sebesar 27,29%.

Pada Tabel 4.3 juga menunjukkan tentang pencapaian indikator KKP peserta KB baru (PB) MKJP untuk masing-masing kabupaten/kota. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa rentang capaian peserta KB baru metode MKJP pada masing-masing kabupaten/kota yang terhitung sampai bulan Juli 2019 masih terdapat beberapa wilayah yang berada dibawah KKP peserta KB baru (PB) MKJP Provinsi Jawa Timur yaitu 57,74%. Kabupaten/kota tersebut antara lain adalah kabupaten Pacitan 52,56%, kabupaten Ponorogo 57,02%, kabupaten Trenggalek 54%, kabupaten Blitar 53,24%, kabupaten Lumajang 52,73%, kabupaten Sidoarjo 51,48%, kabupaten Mojokerto 50,79%, kabupaten Jombang 57,64%, kabupaten Ngawi 47,58%, kabupaten

Bojonegoro 56,82%, kabupaten Lamongan 47,08%, kabupaten Gresik 49,77%, kabupaten Bangkalan 54,83%, kabupaten Sampang 47,53%, kabupaten Pamekasan 33,52%, kabupaten Sumenep 51,23%, kota Blitar 55,83%, kota Malang 54,41%, kota Probolinggo 44,13%, dan kota Batu 55,92%. Dari 38 kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Timur, kota Pasuruan memiliki capaian peserta KB baru (PB) MKJP terhadap KKP PB MKJP Provinsi Jawa Timur yang tertinggi, yaitu sebesar 81,16%, serta untuk capaian peserta KB baru (PB) MKJP terhadap KKP PB MKJP terendah adalah kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 33,32% dari KKP PB MKJP Jawa Timur sebesar 57,74%.

Penggunaan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor lingkungan seperti keluarga, masyarakat, dan petugas kesehatan, faktor sosiodemografi (umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, jumlah anak yang diinginkan, dan status wanita), faktor program (pengetahuan tentang KB, pengalaman ber-KB sebelumnya, *informed consent, informed choice*), serta faktor sarana (ketersediaan obat atau alat kontrasepsi, tenaga pelayanan, tempat pelayan, dan biaya). Menurut penelitian oleh Asih dan Oesman (2009), variabel terkuat yang mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi adalah umur. Umur memiliki pengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki dan keinginan untuk mempunyai anak. Semakin tua umur seseorang maka akan semakin bijak dalam memilih alat kontrasepsi untuk dirinya. Status wanita atau peran wanita juga memiliki pengaruh dalam pemilihan alat kontrasepsi. Status wanita tersebut adalah keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan memilih alat kontrasepsi. Wanita yang terlibat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan alat kontrasepsi maka cenderung akan menggunakan kontrasepsi jenis MKJP.

Berdasarkan studi pendahuluan dari penelitian oleh Fajriyah (2016) di Ds. Sentol, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, cakupan penggunaan KB MKJP, khususnya KB IUD, di desa Sentol masih rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil laporan PB MKJP terhadap KKP PB MKJP Kabupaten Pamekasan sampai dengan bulan Juli 2019 yang mempunyai persentase terendah dari KKP PB MKJP Provinsi Jawa Timur. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 10 akseptor non IUD, 3 akseptor mengatakan bahwa biaya IUD cukup mahal, 2 akseptor beralasan takut apabila alat IUD yang digunakan akan keluar dengan sendirinya saat bersenggama dengan suami karena pengalaman dari teman yang menggunakan IUD, 4 akseptor masih merasa tabu atau malu untuk menggunakan IUD karena proses pemasangannya terlalu rumit, dan 1 akseptor mengatakan bahwa bidan desa tidak menjelaskan tentang kontrasepsi IUD

pada saat konseling KB, sehingga akseptor tidak mengetahui tentang metode kontrasepsi IUD.

Sedangkan menurut penelitian dari Triyanto (2018), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam penggunaan kontrasepsi metode MKJP. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi orang tersebut dalam bertindak dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi terhadap dirinya. Tingkat pendidikan yang tinggi pada umumnya akan membuat seseorang lebih luas pandangannya dan lebih muda dalam menerima informasi, ide, maupun hal-hal inovatif. Pada penelitian tersebut dihasilkan bahwa responden yang tidak bersekolah atau berpendidikan rendah cenderung lebih banyak menggunakan metode MKJP jenis implan. Sedangkan responden yang memiliki pendidikan SMA kemungkinan untuk menggunakan metode IUD lebih besar daripada responden yang tidak bersekolah.

Faktor lain yang mempengaruhi seseorang dalam penggunaan metode MKJP adalah kelengkapan pelayanan KB. Kelengkapan pelayanan KB menggambarkan kualitas dari pelayanan tersebut. Menurut penelitian dari Fienalia (2012), responden yang mendapatkan kelengkapan pelayanan KB dengan baik lebih banyak dalam penggunaan metode MKJP daripada responden yang tidak mendapatkan kelengkapan pelayanan KB dengan baik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Green tahun 1997, menyatakan bahwa kualitas pelayanan termasuk dalam salah satu faktor yang mendukung munculnya perilaku kesehatan.

Pendapatan keluarga juga mempengaruhi seseorang dalam pemilihan alat kontrasepsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2018) di desa Candimulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, responden dengan pendapatan keluarga tingkat atas cenderung lebih memilih alat kontrasepsi MKJP dibandingkan dengan responden dengan pendapatan keluarga tingkat menengah dan tingkat kurang. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan keluarga yaitu seperti usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan seseorang.

Menurut penelitian oleh Yanti (2013) didapatkan bahwa terdapat pengaruh kepercayaan dan budaya akseptor KB dalam penggunaan kontrasepsi. Menurut Wahyuni dan Oktriyanto (2011) terdapat pandangan agama mengenai larangan pemakaian metode MKJP yaitu pendapat agama yang mengharamkan menggunakan metode kontrasepsi MOW dan MOP, karena pengaturan kelahiran hanya terbatas pada pencegahan kehamilan secara sementara karena tidak merubah ciptaan Allah SWT.

Tetapi, apabila terdapat alasan medis tertentu maka dapat dibenarkan karena termasuk dalam kondisi darurat.

Dari uraian penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan cakupan pelayanan peserta KB baru metode MKJP di wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik pengguna KB (akseptor) pada wilayah tersebut, antara lain yaitu umur, status atau peran wanita dalam pengambilan keputusan, tingkat pendidikan, pengalaman ber-KB sebelumnya atau pengalaman ber-KB dari teman atau keluarga yang lain, pelayanan KB dilapangan yang didapatkan oleh calon akseptor KB, pendapatan keluarga, serta pengaruh kepercayaan, budaya dan agama di masyarakat.

4.3. Identifikasi Masalah

Dari data laporan hasil analisis program KKBPK bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019 dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB baru metode MKJP cenderung mengalami peningkatan, namun juga mengalami penurunan pada bulan Februari dan Mei, tetapi tidak signifikan. Dari data dan grafik tersebut, tidak semua metode MKJP mencapai sasaran seperti yang telah ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur, terutama pada metode kontrasepsi pria yaitu MOP (Metode Operasi Pria) yang masih rendah capaiannya. Mayoritas peserta KB baru MKJP menggunakan metode kontrasepsi jenis Implan yaitu sebesar 48,34% dari seluruh jenis metode MKJP selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, alasan yang sering dikemukakan oleh calon akseptor, terutama pada calon akseptor KB MOP adalah, mereka beranggapan bahwa KB MOP adalah metode kontrasepsi dengan dikebiri. Hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman serta pengetahuan calon akseptor tentang bagaimana prosedur pelaksanaan MOP, bagaimana cara penyampaian informasi tentang metode kontrasepsi MOP, seperti tata cara pelaksanaan, keuntungan dan kerugian, serta prosedur pelaksanaan MOP tersebut oleh penyuluh dilapangan kepada calon akseptor baru.

Tabel 4.3 Hasil Pencapaian Peserta KB Baru (PB) MKJP Kabupaten/Kota Terhadap KKP PB-MKJP Jawa Timur Bulan Januari-Juli Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	KKP MKJP	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli	
			PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP
1	Kab. Pacitan	3.227	326	10,10	568	17,60	780	24,17	1.059	32,82	1.229	38,08	1.420	44,00	1.696	52,56
2	Kab. Ponorogo	5.668	505	8,91	883	15,58	1.414	24,95	1.930	34,05	2.386	42,10	2.785	49,14	3.232	57,02
3	Kab. Trenggalek	2.102	145	6,90	291	13,84	508	24,17	658	31,30	773	36,77	895	42,58	1.135	54,00
4	Kab. Tulungagung	4.246	339	7,98	667	15,71	1.125	26,50	1.381	32,52	1.613	37,99	1.860	43,81	2.509	59,09
5	Kab. Blitar	11.958	1.278	10,69	2.463	20,60	3.359	28,09	4.209	35,20	4.829	40,38	5.455	45,62	6.366	53,24
6	Kab. Kediri	11.082	582	5,25	1.083	9,77	3.062	27,63	3.964	35,77	4.393	39,64	5.244	47,32	6.859	61,89
7	Kab. Malang	13.110	1.273	9,71	2.882	21,98	4.180	31,88	5.709	43,55	6.446	49,17	7.056	53,82	8.185	62,43
8	Kab. Lumajang	5.441	614	11,28	1.015	18,65	1.521	27,95	2.033	37,36	2.274	41,79	2.436	44,77	2.869	52,73
9	Kab. Jember	9.056	1.001	11,05	1.847	20,40	3.125	34,51	4.163	45,97	4.790	52,89	5.462	60,31	6.579	72,65
10	Kab. Banyuwangi	11.470	1.168	10,18	2.006	17,49	3.242	28,27	4.337	37,81	5.166	45,04	5.840	50,92	6.725	58,63
11	Kab. Bondowoso	3.653	281	7,69	967	26,47	1.453	39,78	1.824	49,93	1.959	53,63	2.054	56,23	2.211	60,53
12	Kab. Situbondo	2.769	212	7,66	469	16,94	1.047	37,81	1.385	50,02	1.414	51,07	1.429	51,61	1.649	59,55
13	Kab. Probolinggo	4.621	487	10,54	923	19,97	1.502	32,50	2.247	48,63	2.418	52,33	2.571	55,64	2.771	59,97
14	Kab. Pasuruan	4.415	376	8,52	744	16,85	1.153	26,12	1.671	37,85	1.971	44,64	2.341	53,02	2.784	63,06
15	Kab. Sidoarjo	7.346	438	5,96	961	13,08	1.818	24,75	2.370	32,26	2.734	37,22	3.185	43,36	3.782	51,48
16	Kab. Mojokerto	8.498	562	6,61	1.296	15,25	2.162	25,44	2.807	33,03	3.305	38,89	3.795	44,66	4.316	50,79
17	Kab. Jombang	5.861	451	7,69	812	13,85	1.351	23,05	1.848	31,53	2.371	40,45	2.876	49,07	3.378	57,64
18	Kab. Nganjuk	7.563	573	7,58	1.067	14,11	1.760	23,27	2.696	35,65	3.091	40,87	3.561	47,08	4.527	59,86
19	Kab. Madiun	4.048	318	7,86	653	16,13	1.031	25,47	1.391	34,36	1.680	41,50	1.951	48,20	2.479	61,24
20	Kab. Magetan	3.056	199	6,51	462	15,12	750	24,54	1.046	34,23	1.225	40,09	1.424	46,60	1.919	62,79
21	Kab. Ngawi	4.792	292	6,09	558	11,64	845	17,63	1.222	25,50	1.517	31,66	1.752	36,56	2.280	47,58
22	Kab. Bojonegoro	10.003	929	9,29	1.935	19,34	3.047	30,46	3.849	38,48	4.399	43,98	4.927	49,26	5.684	56,82
23	Kab. Tuban	8.456	1.023	12,10	2.063	24,40	2.745	32,46	4.437	52,47	3.939	46,58	4.346	51,40	5.242	61,99
24	Kab. Lamongan	5.486	571	10,41	958	17,46	1.255	22,88	1.665	30,35	1.807	32,94	2.161	39,39	2.583	47,08
25	Kab. Gresik	4.690	529	11,28	880	18,76	1.257	26,80	1.649	35,16	1.816	38,72	2.036	43,41	2.334	49,77

26	Kab. Bangkalan	2.050	175	8,54	323	15,76	501	24,44	660	32,20	825	40,24	924	45,07	1.124	54,83
27	Kab. Sampang	2.184	189	8,65	331	15,16	483	22,12	693	31,73	766	35,07	872	39,93	1.038	47,53
28	Kab. Pamekasan	2.184	90	4,12	192	8,79	303	13,87	433	19,83	523	23,95	596	27,29	732	33,52
29	Kab. Sumenep	1.704	87	5,11	110	6,46	404	23,71	597	35,04	640	37,56	732	42,96	873	51,23
30	Kota Kediri	812	82	10,10	148	18,23	230	28,33	322	39,66	398	49,01	398	49,01	486	59,85
31	Kota Blitar	1.150	94	8,17	164	14,26	270	23,48	361	31,39	462	40,17	547	47,57	642	55,83
32	Kota Malang	5.196	395	7,60	921	17,73	1.272	24,48	1.632	31,41	2.057	39,59	2.278	43,84	2.827	54,41
33	Kota Probolinggo	1.958	116	5,92	348	17,77	470	24,00	565	28,86	656	33,50	743	37,95	864	44,13
34	Kota Pasuruan	674	71	10,53	246	36,50	312	46,29	377	55,93	435	64,54	486	72,11	547	81,16
35	Kota Mojokerto	1.150	99	8,61	200	17,39	306	26,61	412	35,83	504	43,83	599	52,09	742	64,52
36	Kota Madiun	1.954	207	10,59	395	20,21	625	31,99	890	45,55	1.086	55,58	1.261	64,53	1.481	75,79
37	Kota Surabaya	9.793	991	10,12	1.817	18,55	2.800	28,59	3.948	40,31	4.693	47,92	5.368	54,81	6.261	63,93
38	Kota Batu	1.976	127	6,43	367	18,57	512	25,91	674	34,11	820	41,50	972	49,19	1.105	55,92
	Jawa Timur	195.402	17.195	8,80	34.015	17,41	53.980	27,63	73.114	37,42	83.410	42,69	94.638	48,43	112.816	57,74

Selain berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman calon akseptor tentang metode kontrasepsi MOP, faktor kebudayaan juga berpengaruh terhadap perilaku calon akseptor dalam melakukan metode kontrasepsi MOP. Menurut wawancara, tidak sedikit dari calon akseptor KB pria, terutama MOP yang menganggap bahwa urusan kepentingan menggunakan alat kontrasepsi sepenuhnya adalah kebutuhan wanita, bukan pria, sehingga pria dianggap tidak terlalu penting untuk ikut serta menjadi akseptor KB.

4.4. Pemecahan Masalah

Hasil pencapaian peserta KB baru metode MKJP terhadap KKP PB MKJP mengalami peningkatan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2019, tetapi masih terdapat satu metode MKJP yang masih kurang diminati oleh masyarakat, sehingga di beberapa daerah masih terdapat hasil pencapaian yang dibawah KKP. Metode tersebut adalah metode MOP. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan pencapaian masih 0,00% pada metode tersebut hingga bulan Juli 2019. Adapun upaya yang dapat diusahakan dan dilakukan untuk pemerataan pencapaian peserta KB baru (PB) MKJP, khususnya metode MOP, terhadap KKP adalah sebagai berikut :

1. BKKBN bekerjasama dengan mengadakan kegiatan TOT (Training of Trainer), yaitu semacam kegiatan diklat terhadap penyuluh KB yang dilakukan agar dapat mensosialisasikan KB Pria, khususnya MOP dengan baik, dengan harapan agar bisa memberikan pendidikan di lingkup mereka secara bertahap yaitu dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, dari desa ke kader, kemudian dari kader langsung ke masyarakat.
2. Diperlukan pendekatan kepada tokoh agama (TOGA) dan tokoh masyarakat (TOMAS) di setiap wilayah kabupaten/kota agar dapat membantu tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan atau memperkenalkan metode kontrasepsi jangka panjang khususnya metode MOP dan menghilangkan stigma yang telah terbentuk di masyarakat.
3. Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media sosial terkait dengan metode MKJP terutama metode kontrasepsi MOP yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peserta KB baru (PB) metode MKJP di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2019, namun tidak terlalu signifikan. KKP PB MKJP sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar 57,74%, namun masih terdapat beberapa wilayah dengan KKP dibawah rata-rata KKP Jawa Timur. Dari keempat metode MKJP, metode kontrasepsi MOP merupakan metode kontrasepsi yang kurang diminati, terbukti dari beberapa daerah yang masih memiliki pencapaian sebesar 0,00%.

Kurang diminatinya metode kontrasepsi MOP diakibatkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang metode kontrasepsi tersebut. Muncul berbagai stigma masyarakat untuk metode kontrasepsi MOP, diantaranya adalah bahwa mereka menganggap bahwa metode MOP sama dengan dikebiri. Serta masih adanya faktor kebudayaan yang menganggap bahwa ber-KB merupakan urusan dari wanita, bukan pria. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan metode MKJP, terutama metode kontrasepsi MOP, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan terhadap penyuluh KB di lapangan.

5.2. Saran

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terutama metode kontrasepsi MOP bagi calon akseptor oleh penyuluh KB di lapangan.
- b. Meningkatkan perluasan berita dan informasi melalui media, seperti media sosial mengenai metode kontrasepsi
- c. Melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat membantu penyebaran informasi mengenai metode kontrasepsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y., Martini. 2012. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta : Rohima Press.
- Asih, L., Oesman, H. 2009. Analisa Lanjut SDKI 2007 Faktor Yang Mempengaruhi Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang. *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta : KB dan Kespro. BKKBN
- BKKBN. 2012. *Profil BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur*.
- BKKBN. 2019. *Hasil Analisis dan Evaluasi Program KKBP*
- Fajriyah, N. 2016. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peminatan Akseptor KB Terhadap Metode KB IUD Di Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan-Madura. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fienalia, R.A. 2012. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2011. *Skripsi*. Universitas Indonesia
- Firdaus, E. N. 2018. Pendapatan Keluarga Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi (Di Desa Candimulyo RW 02 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Skripsi*. STIKES Insan Cendikia Jombang.
- Hadie, D.A. 2015. Beberapa faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Studi Pada Akseptor KB di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Vol. 3 No.01 pp 27-33
- Indahwati, L., Wati, L.R., Wulandari, D.T. 2017. Usia dan Pengalaman KB Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi. *Journal of Issues in Midwifery*, Vol. 1 No.2 pp. 9-18
- Irianto, K. 2012. *Keluarga Berencana Untuk Paramedis dan Nonmedis*. Bandung : Yrama Widya.
- Mulyani, S.N., Rinawati, M. 2013. *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- Septalia, R., Puspitasari, N. 2016. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 5 No.2 pp. 91-98.

- Triyanto, L., Indriani, D. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Menikah Usia Subur di Provinsi Jawa Timur. *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 13 No. 2 pp 244-255
- Wahyuni, S., Oktriyanto. 2011. Sterilisasi Kurang Mendongkrak Penurunan Fertilitas. *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: KB dan Kespro. BKKBN
- Yanti, N.H.,2012. Pengaruh Budaya Akseptor KB Terhadap Penggunaan Kontrasepsi IUD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara

Lampiran



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fms. 031-5924618

Website: <http://www.fkm.unma.ac.id>; E-mail: info@fkm.unma.ac.id

Nomor : 4653/UN3.1.10/PPd/2019
Hal : Permohonan izin magang

11 Juli 2019

Yth.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Jawa Timur
2. Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur

Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat (Alih Jenis) Program Sarjana (S1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	PEMBIMBING	PEMINATAN
1.	Ilhami	101711123017	Hario Megatsari, S.KM.,M.Kes	Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku
2.	Sindi Eka Putri	101711123033		
3.	Rif'atin Haibah	101711123037		
4.	Nurshe Aliviolla Azmi	101711123042		
5.	Retananda Tri Ragiliawati	101711123045		
6.	Feri Styaningsih	101711123044	Dr. Rr. Soenarnatalina, Ir., M.Kes	Biostatistika & Kependudukan
7.	Wieke Retno P.	101711123002	Dr. Hari Basuki N., dr., M.Kes	
8.	Rizki Arista Devi	101711123026	Yuli Sulistyorini, S.KM., M.Kes	KIA
9.	Aliqul Abdryah	101711123028		
10.	Hasriyah Rizka Kumala	101711123057	Nunik Puspitasari, S.KM., M.Kes	

Sebagai peserta magang pada **BKKBN Provinsi Jawa Timur**, selama minimal 1 (satu) bulan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR,
2. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
3. Ketua Departemen Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku, FKM UNAIR;
4. Ketua Departemen Biostatistika & Kependudukan, FKM UNAIR;
5. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
6. Yang bersangkutan.



Nomor : 2516 / KP.12/J1/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Izin Magang

Surabaya, 02 September 2019

Yth.
**Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Airlangga**
 Di Surabaya

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya perihal Permohonan Izin Magang di Perwakilan BKKBN Jawa Timur nomor 4653/UN3.1.10/PPd/2019, bersama ini kami sampaikan beberapa hal:

1. Pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	PEMINATAN
1	Ilhami	101711123017	Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku
2	Sindi Eka Putri	101711123033	
3	Rifatun Haibah	101711123037	
4	Nurshe Aliviolla Azmi	101711123042	
5	Retananda Tri Ragiliawati	101711123045	
6	Feri Styaningsih	101711123044	Biostatistika & Kependudukan
7	Wieke Retno P	101711123002	
8	Rizki Arista Devi	101711123026	KIA
9	Aliqul Abdiah	101711123028	
10	Hasniah Rizka Kumala	101711123057	

Untuk melaksanakan Magang di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Magang akan dilaksanakan mulai tanggal 02 September sampai 04 Oktober 2019.

2. Sebelum melaksanakan Magang diharapkan kepada mahasiswa untuk menemui Kasubag Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
3. Mahasiswa yang melaksanakan Magang diwajibkan mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n Kepala,
 Kasubbag Kepegawaian dan Hukum

Wiwin Indrawahyu Vita, S.Sos
 NIP. 19730331 199803 2 005

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur
 Jl. Airlangga No. 31-33, Surabaya 60017, Telp. (031) 5022331, 5035089, 5012583 (hunting)

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA
DEPARTEMEN BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2019**

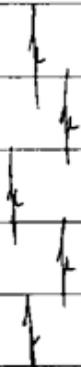
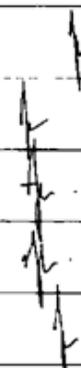
Nama : Weike Retno Palupi
 NIM : 101711123002
 Tempat Magang : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur
 Pembimbing : Dr. Hari Basuki N., dr., M.Kes

No	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Izin	Keterangan	Paraf
1	2 September 2019	07.00	16.00			1.
2	3 September 2019	07.30	16.00			2.
3	4 September 2019	07.28	16.00			3.
4	5 September 2019	07.30	16.00			4.
5	6 September 2019	07.13	14.00			5.
6	9 September 2019	07.10	16.00			6.
7	10 September 2019	07.20	16.00			7.
8	11 September 2019	07.10	16.00	08.30 - 13.00 KLUAH TAMU	Ditah baru ds fmg Don Menti	8.
9	12 September 2019	07.20	16.00			9.
10	13 September 2019	07.25	14.00			10.

11	16 September 2019	07.15	16.00			11.	
12	17 September 2019	07.30	16.00			12.	
13	18 September 2019	07.30	16.00			13.	
14	19 September 2019	07.15	16.00			14.	
15	20 September 2019	07.25	16.00			15.	
16	23 September 2019	07.20				16.	
17	24 September 2019	07.30	16.00			17.	
18	25 September 2019	07.20	16.00			18.	
19	26 September 2019	07.50	16.00			19.	
20	27 September 2019	07.30	14.00			20.	
21	30 September 2019	07.15	16.00			21.	
22	1 Oktober 2019	07.30	16.00			22.	
23	2 Oktober 2019	07.25	15.00			23.	
24	3 Oktober 2019	07.30	16.00			24.	
25	4 Oktober 2019	07.20	14.00			25.	

LEMBAR KEGIATAN HARIAN MAGANG

NAMA : WEIKE RETNO PALUPI
 NIM : 101711123002
 TEMPAT MAGANG : Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
 Prov. Jawa Timur

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke- 1		
Hari ke- 1 Tanggal .2. Sept 2019	Apel pagi Pembagian ruang (ADPIM) Entry koleksi perpustakaan DATIN	
Hari ke- 2 Tanggal .3. Sept 2019	Entry data buku	
Hari ke- 3 Tanggal .4. Sept 2019	Entry data buku Entry data Pengguna KB	
Hari ke- 4 Tanggal 5. Sept 2019	Entry Rekapitan Penilaian Pegawai PKB Kab Entry data buku	
Hari ke- 5 Tanggal 6. Sept 2019	Senam pagi Mengikuti kegiatan Darma Wanita Entry data di perpustakaan	
Minggu ke- 2		
Hari ke- 1 Tanggal 9 Sept 2019	Apel pagi Kirim fax ke Kab/Kota Berbenah /merapikan Perpustakaan dg staf ADPIM	
Hari ke- 2 Tanggal 10. 09-2019	- Merapikan perpustakaan dg staf - Kirim fax ttg Hasil Kampung KB	
Hari ke- 3 Tanggal 11. 09-2019	- Mengikuti kuliah tamu di FKM UNAIR (UIN) 08.30 - 13.00	
Hari ke- 4 Tanggal 12. 09-2019	- Mencari data untuk laporan magang	
Hari ke- 5 Tanggal 13. 09-2019	Senam Pagi Mencari referensi buku untuk menyusun laporan	
Minggu ke- 3		
Hari ke- 1 Tanggal 16. 09-2019	- Mencari data u/ laporan magang - Apel pagi	
Hari ke- 2 Tanggal 17. 09-2019	- Menyusun laporan magang	

Hari ke-3 Tanggal 18..:	- Menyusun laporan magang	
Hari ke-4 Tanggal 19..:	- Membuat laporan magang - Entry data PB-KB se. Kab/Kota	
Hari ke-5 Tanggal 20..:	- Senam Pagi - Entry data PB-KB sek. Kab/Kota	
Minggu ke-4		
Hari ke-1 Tanggal 23..9-2019	- Membuat laporan magang - Apel pagi	
Hari ke-2 Tanggal 24..9-2019	Menyusun laporan magang - Mencari referensi buku di perpustakaan	
Hari ke-3 Tanggal 25..9-2019	Menyusun laporan magang	
Hari ke-4 Tanggal 26..9-2019	Menyusun laporan magang	
Hari ke-5 Tanggal 27..9-2019	- Senam Pagi Menyusun laporan magang	
Minggu ke-5		
Hari ke-1 Tanggal 30..9-2019	Apel Pagi Menyusun laporan magang	
Hari ke-2 Tanggal 01..10-2019	Menyelesaikan laporan magang	
Hari ke-3 Tanggal 02..10-2019	Supervisi dosen	
Hari ke-4 Tanggal 03..10-2019	Menyelesaikan laporan magang	
Hari ke-5 Tanggal 04..10-2019	Cenam Pagi Menyelesaikan laporan magang	

Dokumentasi Kegiatan Magang







**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI 2019**

No.	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	145	1332	10,89	14	150	9,33		20	0,00	167	1725	9,68
2	Kab. Ponorogo	296	2979	9,94	64	720	8,89		20	0,00	145	1949	7,44
3	Kab. Trenggalek	48	735	6,53	6	270	2,22		5	0,00	91	1092	8,33
4	Kab. Tulungagung	73	1058	6,90	50	910	5,49		25	0,00	216	2253	9,59
5	Kab. Blitar	494	5257	9,40	45	470	9,57	4	25	16,00	735	6206	11,84
6	Kab. Kediri	240	4413	5,44	47	975	4,82		40	0,00	295	5654	5,22
7	Kab. Malang	486	4366	11,13	64	1510	4,24		30	0,00	723	7204	10,04
8	Kab. Lumajang	177	1583	11,18	14	395	3,54		20	0,00	423	3443	12,29
9	Kab. Jember	258	2791	9,24	16	1050	1,52		70	0,00	727	5145	14,13
10	Kab. Banyuwangi	368	3843	9,58	110	750	14,67		80	0,00	690	6797	10,15
11	Kab. Bondowoso	19	312	6,09	23	270	8,52	1	55	1,82	238	3016	7,89
12	Kab. Situbondo	51	510	10,00	37	350	10,57		400	0,00	124	1509	8,22
13	Kab. Probolinggo	56	639	8,76	46	590	7,80		25	0,00	385	3367	11,43
14	Kab. Pasuruan	155	1640	9,45	33	750	4,40		25	0,00	188	2000	9,40
15	Kab. Sidoarjo	227	3564	6,37	84	1289	6,52		35	0,00	127	2458	5,17
16	Kab. Mojokerto	253	3822	6,62	63	1185	5,32		20	0,00	246	3471	7,09
17	Kab. Jombang	217	2507	8,66	57	850	6,71	8	15	53,33	169	2489	6,79
18	Kab. Nganjuk	286	3122	9,16	37	845	4,38		15	0,00	250	3581	6,98
19	Kab. Madiun	171	1906	8,97	26	550	4,73	4	12	33,33	117	1580	7,41
20	Kab. Magetan	105	1833	5,73	11	370	2,97		25	0,00	83	828	10,02
21	Kab. Ngawi	216	3031	7,13	5	125	4,00		5	0,00	71	1631	4,35
22	Kab. Bojonegoro	320	4140	7,73	40	850	4,71	2	35	5,71	567	4978	11,39
23	Kab. Tuban	272	2328	11,68	42	810	5,19		40	0,00	709	5278	13,43
24	Kab. Lamongan	118	1709	6,90	129	900	14,33		20	0,00	324	2857	11,34

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

25	Kab. Gresik	202	1555	12,99	37	295	12,54	2	30	6,67	288	2810	10,25
26	Kab. Bangkalan	40	234	17,09	40	410	9,76		11	0,00	95	1395	6,81
27	Kab. Sampang	47	223	21,08	24	250	9,60		5	0,00	118	1706	6,92
28	Kab. Pamekasan	25	223	11,21	19	250	7,60		5	0,00	46	1706	2,70
29	Kab. Sumenep	7	36	19,44	4	290	1,38		10	0,00	76	1368	5,56
30	Kota Kediri	15	258	5,81	24	385	6,23		10	0,00	43	159	27,04
31	Kota Blitar	77	864	8,91	12	155	7,74		60	0,00	5	71	7,04
32	Kota Malang	261	3457	7,55	60	850	7,06		10	0,00	74	879	8,42
33	Kota Probolinggo	46	415	11,08	14	200	7,00		5	0,00	56	1338	4,19
34	Kota Pasuruan	35	228	15,35	5	65	7,69		5	0,00	31	376	8,24
35	Kota Mojokerto	62	704	8,81	30	310	9,68		5	0,00	7	131	5,34
36	Kota Madiun	146	1319	11,07	41	360	11,39		15	0,00	20	260	7,69
37	Kota Surabaya	508	4826	10,53	217	2165	10,02	42	400	10,50	224	2402	9,33
38	Kota Batu	94	1161	8,10	13	230	5,65	9	20	45,00	11	565	1,95
	Jawa Timur	6.616	74.923	8,83	1.603	23.149	6,92	72	1.653	4,36	8.904	95.677	9,31

**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2019**

No,	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	231	1332	17,34	31	150	20,67		20	0,00	306	1725	17,74
2	Kab. Ponorogo	531	2979	17,82	108	720	15,00		20	0,00	244	1949	12,52
3	Kab. Trenggalek	76	735	10,34	12	270	4,44		5	0,00	203	1092	18,59
4	Kab. Tulungagung	176	1058	16,64	89	910	9,78		25	0,00	402	2253	17,84
5	Kab. Blitar	964	5257	18,34	68	470	14,47	6	25	24,00	1425	6206	22,96
6	Kab. Kediri	464	4413	10,51	91	975	9,33		40	0,00	518	5654	9,16
7	Kab. Malang	935	4366	21,42	484	1510	32,05	9	30	30,00	1454	7204	20,18
8	Kab. Lumajang	255	1583	16,11	22	395	5,57		20	0,00	738	3443	21,43
9	Kab. Jember	517	2791	18,52	63	1050	6,00		70	0,00	1267	5145	24,63
10	Kab. Banyuwangi	655	3843	17,04	172	750	22,93	11	80	13,75	1168	6797	17,18
11	Kab. Bondowoso	75	312	24,04	44	270	16,30	13	55	23,64	835	3016	27,69
12	Kab. Situbondo	82	510	16,08	71	350	20,29		400	0,00	316	1509	20,94
13	Kab. Probolinggo	85	639	13,30	63	590	10,68		25	0,00	775	3367	23,02
14	Kab. Pasuruan	262	1640	15,98	51	750	6,80		25	0,00	431	2000	21,55
15	Kab. Sidoarjo	507	3564	14,23	165	1289	12,80		35	0,00	289	2458	11,76
16	Kab. Mojokerto	538	3822	14,08	269	1185	22,70		20	0,00	489	3471	14,09
17	Kab. Jombang	378	2507	15,08	117	850	13,76	8	15	53,33	309	2489	12,41
18	Kab. Nganjuk	522	3122	16,72	61	845	7,22		15	0,00	484	3581	13,52
19	Kab. Madiun	318	1906	16,68	47	550	8,55	8	12	66,67	280	1580	17,72
20	Kab. Magetan	254	1833	13,86	17	370	4,59		25	0,00	191	828	23,07
21	Kab. Ngawi	404	3031	13,33	10	125	8,00		5	0,00	144	1631	8,83
22	Kab. Bojonegoro	618	4140	14,93	73	850	8,59	3	35	8,57	1241	4978	24,93
23	Kab. Tuban	466	2328	20,02	280	810	34,57	26	40	65,00	1291	5278	24,46

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	224	1709	13,11	207	900	23,00		20	0,00	527	2857	18,45
25	Kab. Gresik	329	1555	21,16	60	295	20,34	2	30	6,67	489	2810	17,40
26	Kab. Bangkalan	76	234	32,48	83	410	20,24		11	0,00	164	1395	11,76
27	Kab. Sampang	67	223	30,04	84	250	33,60		5	0,00	180	1706	10,55
28	Kab. Pamekasan	43	223	19,28	50	250	20,00		5	0,00	99	1706	5,80
29	Kab. Sumenep	10	36	27,78	7	290	2,41		10	0,00	93	1368	6,80
30	Kota Kediri	35	258	13,57	46	385	11,95		10	0,00	67	159	42,14
31	Kota Blitar	135	864	15,63	23	155	14,84		60	0,00	6	71	8,45
32	Kota Malang	489	3457	14,15	219	850	25,76	6	10	60,00	207	879	23,55
33	Kota Probolinggo	88	415	21,20	35	200	17,50	2	5	40,00	223	1338	16,67
34	Kota Pasuruan	76	228	33,33	14	65	21,54		5	0,00	156	376	41,49
35	Kota Mojokerto	126	704	17,90	59	310	19,03		5	0,00	15	131	11,45
36	Kota Madiun	271	1319	20,55	77	360	21,39	3	15	20,00	44	260	16,92
37	Kota Surabaya	919	4826	19,04	456	2165	21,06	49	400	12,25	393	2402	16,36
38	Kota Batu	207	1161	17,83	43	230	18,70	10	20	50,00	107	565	18,94
	Jawa Timur	12.408	74.923	16,56	3.871	23.149	16,72	156	1.653	9,44	17.570	95.677	18,36

**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019**

No.	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	327	1332	24,55	38	150	25,33		20	0,00	415	1725	24,06
2	Kab. Ponorogo	800	2979	26,85	208	720	28,89	5	20	25,00	401	1949	20,57
3	Kab. Trenggalek	146	735	19,86	40	270	14,81		5	0,00	322	1092	29,49
4	Kab. Tulungagung	271	1058	25,61	320	910	35,16	10	25	40,00	524	2253	23,26
5	Kab. Blitar	1360	5257	25,87	89	470	18,94	12	25	48,00	1898	6206	30,58
6	Kab. Kediri	1118	4413	25,33	175	975	17,95		40	0,00	1769	5654	31,29
7	Kab. Malang	1376	4366	31,52	578	1510	38,28	9	30	30,00	2217	7204	30,77
8	Kab. Lumajang	365	1583	23,06	50	395	12,66	2	20	10,00	1104	3443	32,07
9	Kab. Jember	824	2791	29,52	389	1050	37,05	17	70	24,29	1895	5145	36,83
10	Kab. Banyuwangi	1064	3843	27,69	253	750	33,73	11	80	13,75	1914	6797	28,16
11	Kab. Bondowoso	120	312	38,46	63	270	23,33	13	55	23,64	1257	3016	41,68
12	Kab. Situbondo	116	510	22,75	221	350	63,14		400	0,00	710	1509	47,05
13	Kab. Probolinggo	136	639	21,28	110	590	18,64		25	0,00	1256	3367	37,30
14	Kab. Pasuruan	362	1640	22,07	91	750	12,13		25	0,00	700	2000	35,00
15	Kab. Sidoarjo	843	3564	23,65	304	1289	23,58		35	0,00	671	2458	27,30
16	Kab. Mojokerto	793	3822	20,75	630	1185	53,16	9	20	45,00	730	3471	21,03
17	Kab. Jombang	642	2507	25,61	181	850	21,29	8	15	53,33	520	2489	20,89
18	Kab. Nganjuk	783	3122	25,08	249	845	29,47	5	15	33,33	723	3581	20,19
19	Kab. Madiun	433	1906	22,72	210	550	38,18	12	12	100,00	376	1580	23,80
20	Kab. Magetan	425	1833	23,19	26	370	7,03		25	0,00	299	828	36,11
21	Kab. Ngawi	613	3031	20,22	13	125	10,40		5	0,00	219	1631	13,43
22	Kab. Bojonegoro	924	4140	22,32	259	850	30,47	18	35	51,43	1846	4978	37,08
23	Kab. Tuban	670	2328	28,78	318	810	39,26	26	40	65,00	1731	5278	32,80

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	333	1709	19,49	306	900	34,00	15	20	75,00	601	2857	21,04
25	Kab. Gresik	458	1555	29,45	95	295	32,20	12	30	40,00	692	2810	24,63
26	Kab. Bangkalan	109	234	46,58	121	410	29,51		11	0,00	271	1395	19,43
27	Kab. Sampang	87	223	39,01	117	250	46,80		5	0,00	279	1706	16,35
28	Kab. Pamekasan	65	223	29,15	90	250	36,00		5	0,00	148	1706	8,68
29	Kab. Sumenep	11	36	30,56	15	290	5,17		10	0,00	378	1368	27,63
30	Kota Kediri	63	258	24,42	79	385	20,52		10	0,00	88	159	55,35
31	Kota Blitar	224	864	25,93	33	155	21,29		60	0,00	13	71	18,31
32	Kota Malang	722	3457	20,89	278	850	32,71	6	10	60,00	266	879	30,26
33	Kota Probolinggo	129	415	31,08	54	200	27,00	2	5	40,00	285	1338	21,30
34	Kota Pasuruan	110	228	48,25	28	65	43,08		5	0,00	174	376	46,28
35	Kota Mojokerto	182	704	25,85	101	310	32,58		5	0,00	23	131	17,56
36	Kota Madiun	426	1319	32,30	129	360	35,83	3	15	20,00	67	260	25,77
37	Kota Surabaya	1360	4826	28,18	769	2165	35,52	69	400	17,25	602	2402	25,06
38	Kota Batu	311	1161	26,79	65	230	28,26	13	20	65,00	123	565	21,77
	Jawa Timur	19.101	74.923	25,49	7.095	23.149	30,65	277	1.653	16,76	27.507	95.677	28,75

**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2019**

No.	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	399	1332	29,95	49	150	32,67		20	0,00	611	1725	35,42
2	Kab. Ponorogo	1067	2979	35,82	277	720	38,47	7	20	35,00	579	1949	29,71
3	Kab. Trenggalek	197	735	26,80	59	270	21,85		5	0,00	402	1092	36,81
4	Kab. Tulungagung	353	1058	33,36	366	910	40,22	10	25	40,00	652	2253	28,94
5	Kab. Blitar	1844	5257	35,08	132	470	28,09	17	25	68,00	2216	6206	35,71
6	Kab. Kediri	1396	4413	31,63	423	975	43,38	18	40	45,00	2127	5654	37,62
7	Kab. Malang	1814	4366	41,55	666	1510	44,11	9	30	30,00	3220	7204	44,70
8	Kab. Lumajang	479	1583	30,26	74	395	18,73	2	20	10,00	1478	3443	42,93
9	Kab. Jember	1075	2791	38,52	449	1050	42,76	17	70	24,29	2022	5145	39,30
10	Kab. Banyuwangi	1449	3843	37,70	347	750	46,27	11	80	13,75	2530	6797	37,22
11	Kab. Bondowoso	169	312	54,17	86	270	31,85	13	55	23,64	1556	3016	51,59
12	Kab. Situbondo	132	510	25,88	250	350	71,43		400	0,00	1003	1509	66,47
13	Kab. Probolinggo	175	639	27,39	384	590	65,08	27	25	108,00	1661	3367	49,33
14	Kab. Pasuruan	474	1640	28,90	237	750	31,60	5	25	20,00	955	2000	47,75
15	Kab. Sidoarjo	1099	3564	30,84	437	1289	33,90		35	0,00	834	2458	33,93
16	Kab. Mojokerto	1116	3822	29,20	725	1185	61,18	9	20	45,00	957	3471	27,57
17	Kab. Jombang	916	2507	36,54	258	850	30,35	8	15	53,33	666	2489	26,76
18	Kab. Nganjuk	1101	3122	35,27	278	845	32,90	14	15	93,33	1303	3581	36,39
19	Kab. Madiun	641	1906	33,63	237	550	43,09	12	12	100,00	501	1580	31,71
20	Kab. Magetan	570	1833	31,10	34	370	9,19		25	0,00	442	828	53,38
21	Kab. Ngawi	832	3031	27,45	20	125	16,00		5	0,00	370	1631	22,69
22	Kab. Bojonegoro	1203	4140	29,06	371	850	43,65	19	35	54,29	2256	4978	45,32
23	Kab. Tuban	889	2328	38,19	1369	810	169,01	26	40	65,00	2153	5278	40,79

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	442	1709	25,86	388	900	43,11	26	20	130,00	809	2857	28,32
25	Kab. Gresik	584	1555	37,56	135	295	45,76	12	30	40,00	918	2810	32,67
26	Kab. Bangkalan	132	234	56,41	160	410	39,02		11	0,00	368	1395	26,38
27	Kab. Sampang	109	223	48,88	140	250	56,00		5	0,00	444	1706	26,03
28	Kab. Pamekasan	91	223	40,81	101	250	40,40		5	0,00	241	1706	14,13
29	Kab. Sumenep	17	36	47,22	19	290	6,55	1	10	10,00	560	1368	40,94
30	Kota Kediri	106	258	41,09	116	385	30,13		10	0,00	100	159	62,89
31	Kota Blitar	295	864	34,14	45	155	29,03	6	60	10,00	15	71	21,13
32	Kota Malang	941	3457	27,22	334	850	39,29	6	10	60,00	351	879	39,93
33	Kota Probolinggo	165	415	39,76	76	200	38,00	2	5	40,00	322	1338	24,07
34	Kota Pasuruan	138	228	60,53	34	65	52,31		5	0,00	205	376	54,52
35	Kota Mojokerto	228	704	32,39	136	310	43,87	6	5	120,00	42	131	32,06
36	Kota Madiun	591	1319	44,81	177	360	49,17	6	15	40,00	116	260	44,62
37	Kota Surabaya	1887	4826	39,10	1099	2165	50,76	83	400	20,75	879	2402	36,59
38	Kota Batu	437	1161	37,64	86	230	37,39	15	20	75,00	136	565	24,07
	Jawa Timur	25.553	74.923	34,11	10.574	23.149	45,68	387	1.653	23,41	36.000	95.677	37,63

**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2019**

No.	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	476	1332	35,74	59	150	39,33		20	0,00	694	1725	40,23
2	Kab. Ponorogo	1358	2979	45,59	329	720	45,69	7	20	35,00	692	1949	35,51
3	Kab. Trenggalek	243	735	33,06	73	270	27,04		5	0,00	457	1092	41,85
4	Kab. Tulungagung	431	1058	40,74	412	910	45,27	15	25	60,00	755	2253	33,51
5	Kab. Blitar	2242	5257	42,65	165	470	35,11	17	25	68,00	2405	6206	38,75
6	Kab. Kediri	1567	4413	35,51	502	975	51,49	18	40	45,00	2306	5654	40,79
7	Kab. Malang	2140	4366	49,02	764	1510	50,60	9	30	30,00	3533	7204	49,04
8	Kab. Lumajang	546	1583	34,49	85	395	21,52	2	20	10,00	1641	3443	47,66
9	Kab. Jember	1232	2791	44,14	472	1050	44,95	17	70	24,29	3069	5145	59,65
10	Kab. Banyuwangi	1728	3843	44,96	413	750	55,07	11	80	13,75	3014	6797	44,34
11	Kab. Bondowoso	185	312	59,29	113	270	41,85	13	55	23,64	1648	3016	54,64
12	Kab. Situbondo	32	510	6,27	257	350	73,43		400	0,00	1025	1509	67,93
13	Kab. Probolinggo	194	639	30,36	414	590	70,17	27	25	108,00	1783	3367	52,96
14	Kab. Pasuruan	578	1640	35,24	276	750	36,80	5	25	20,00	1112	2000	55,60
15	Kab. Sidoarjo	1260	3564	35,35	555	1289	43,06	10	35	28,57	909	2458	36,98
16	Kab. Mojokerto	1355	3822	35,45	820	1185	69,20	9	20	45,00	1121	3471	32,30
17	Kab. Jombang	1135	2507	45,27	341	850	40,12	8	15	53,33	887	2489	35,64
18	Kab. Nganjuk	1327	3122	42,50	300	845	35,50	14	15	93,33	1450	3581	40,49
19	Kab. Madiun	795	1906	41,71	257	550	46,73	12	12	100,00	616	1580	38,99
20	Kab. Magetan	676	1833	36,88	45	370	12,16		25	0,00	504	828	60,87
21	Kab. Ngawi	1014	3031	33,45	23	125	18,40		5	0,00	480	1631	29,43
22	Kab. Bojonegoro	1463	4140	35,34	423	850	49,76	22	35	62,86	2491	4978	50,04
23	Kab. Tuban	1067	2328	45,83	380	810	46,91	26	40	65,00	2466	5278	46,72

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	511	1709	29,90	422	900	46,89	26	20	130,00	848	2857	29,68
25	Kab. Gresik	676	1555	43,47	160	295	54,24	12	30	40,00	968	2810	34,45
26	Kab. Bangkalan	198	234	84,62	206	410	50,24	1	11	9,09	420	1395	30,11
27	Kab. Sampang	116	223	52,02	171	250	68,40		5	0,00	479	1706	28,08
28	Kab. Pamekasan	109	223	48,88	111	250	44,40		5	0,00	303	1706	17,76
29	Kab. Sumenep	19	36	52,78	24	290	8,28	2	10	20,00	595	1368	43,49
30	Kota Kediri	133	258	51,55	143	385	37,14		10	0,00	122	159	76,73
31	Kota Blitar	378	864	43,75	63	155	40,65	6	60	10,00	15	71	21,13
32	Kota Malang	1228	3457	35,52	424	850	49,88	6	10	60,00	399	879	45,39
33	Kota Probolinggo	203	415	48,92	95	200	47,50	2	5	40,00	356	1338	26,61
34	Kota Pasuruan	161	228	70,61	47	65	72,31		5	0,00	227	376	60,37
35	Kota Mojokerto	286	704	40,63	166	310	53,55	6	5	120,00	46	131	35,11
36	Kota Madiun	708	1319	53,68	233	360	64,72	6	15	40,00	139	260	53,46
37	Kota Surabaya	2303	4826	47,72	1250	2165	57,74	84	400	21,00	1056	2402	43,96
38	Kota Batu	552	1161	47,55	109	230	47,39	15	20	75,00	144	565	25,49
	Jawa Timur	30.625	74.923	40,88	11.102	23.149	47,96	408	1.653	24,68	41.175	95.677	43,04

**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019**

No.	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	565	1332	42,42	75	150	50,00		20	0,00	780	1725	45,22
2	Kab. Ponorogo	1590	2979	53,37	385	720	53,47	7	20	35,00	803	1949	41,20
3	Kab. Trenggalek	294	735	40,00	79	270	29,26		5	0,00	522	1092	47,80
4	Kab. Tulungagung	508	1058	48,02	451	910	49,56	15	25	60,00	886	2253	39,33
5	Kab. Blitar	2609	5257	49,63	197	470	41,91	20	25	80,00	2629	6206	42,36
6	Kab. Kediri	1915	4413	43,39	559	975	57,33	18	40	45,00	2752	5654	48,67
7	Kab. Malang	2407	4366	55,13	853	1510	56,49	9	30	30,00	3787	7204	52,57
8	Kab. Lumajang	608	1583	38,41	95	395	24,05	2	20	10,00	1731	3443	50,28
9	Kab. Jember	1448	2791	51,88	539	1050	51,33	17	70	24,29	3458	5145	67,21
10	Kab. Banyuwangi	1984	3843	51,63	485	750	64,67	11	80	13,75	3360	6797	49,43
11	Kab. Bondowoso	211	312	67,63	125	270	46,30	13	55	23,64	1705	3016	56,53
12	Kab. Situbondo	136	510	26,67	262	350	74,86	1	400	0,25	1030	1509	68,26
13	Kab. Probolinggo	224	639	35,05	432	590	73,22	27	25	108,00	1888	3367	56,07
14	Kab. Pasuruan	700	1640	42,68	315	750	42,00	5	25	20,00	1321	2000	66,05
15	Kab. Sidoarjo	1494	3564	41,92	661	1289	51,28	10	35	28,57	1020	2458	41,50
16	Kab. Mojokerto	1726	3822	45,16	756	1185	63,80	9	20	45,00	1304	3471	37,57
17	Kab. Jombang	1399	2507	55,80	418	850	49,18	10	15	66,67	1049	2489	42,15
18	Kab. Nganjuk	1544	3122	49,46	324	845	38,34	14	15	93,33	1679	3581	46,89
19	Kab. Madiun	943	1906	49,48	275	550	50,00	12	12	100,00	721	1580	45,63
20	Kab. Magetan	807	1833	44,03	52	370	14,05		25	0,00	565	828	68,24
21	Kab. Ngawi	1186	3031	39,13	27	125	21,60		5	0,00	539	1631	33,05
22	Kab. Bojonegoro	1686	4140	40,72	469	850	55,18	22	35	62,86	2750	4978	55,24
23	Kab. Tuban	1207	2328	51,85	400	810	49,38	26	40	65,00	2713	5278	51,40

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	579	1709	33,88	530	900	58,89	26	20	130,00	1026	2857	35,91
25	Kab. Gresik	775	1555	49,84	187	295	63,39	12	30	40,00	1062	2810	37,79
26	Kab. Bangkalan	213	234	91,03	238	410	58,05	1	11	9,09	472	1395	33,84
27	Kab. Sampang	122	223	54,71	190	250	76,00		5	0,00	560	1706	32,83
28	Kab. Pamekasan	121	223	54,26	122	250	48,80		5	0,00	353	1706	20,69
29	Kab. Sumenep	19	36	52,78	26	290	8,97	2	10	20,00	685	1368	50,07
30	Kota Kediri	133	258	51,55	143	385	37,14		10	0,00	122	159	76,73
31	Kota Blitar	448	864	51,85	77	155	49,68	6	60	10,00	16	71	22,54
32	Kota Malang	1368	3457	39,57	482	850	56,71	6	10	60,00	422	879	48,01
33	Kota Probolinggo	239	415	57,59	114	200	57,00	2	5	40,00	388	1338	29,00
34	Kota Pasuruan	184	228	80,70	56	65	86,15		5	0,00	246	376	65,43
35	Kota Mojokerto	344	704	48,86	197	310	63,55	6	5	120,00	52	131	39,69
36	Kota Madiun	820	1319	62,17	288	360	80,00	6	15	40,00	158	260	60,77
37	Kota Surabaya	2659	4826	55,10	1408	2165	65,03	94	400	23,50	1207	2402	50,25
38	Kota Batu	641	1161	55,21	133	230	57,83	15	20	75,00	183	565	32,39
	Jawa Timur	35.856	74.923	47,86	12.425	23.149	53,67	424	1.653	25,65	45.944	95.677	48,02

**HASIL PELAYANAN PENGGUNA KB BARU (PB) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2019**

No.	Kabupaten/Kota	IUD			MOW			MOP			IMPLAN		
		JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%	JML	KKP	%
1	Kab. Pacitan	663	1332	49,77	89	150	59,33		20	0,00	944	1725	54,72
2	Kab. Ponorogo	1851	2979	62,13	439	720	60,97	9	20	45,00	933	1949	47,87
3	Kab. Trenggalek	352	735	47,89	147	270	54,44		5	0,00	636	1092	58,24
4	Kab. Tulungagung	657	1058	62,10	493	910	54,18	15	25	60,00	1344	2253	59,65
5	Kab. Blitar	3071	5257	58,42	221	470	47,02	23	25	92,00	3051	6206	49,16
6	Kab. Kediri	2402	4413	54,43	773	975	79,28	29	40	72,50	3655	5654	64,64
7	Kab. Malang	2808	4366	64,32	934	1510	61,85	9	30	30,00	4434	7204	61,55
8	Kab. Lumajang	745	1583	47,06	112	395	28,35	2	20	10,00	2010	3443	58,38
9	Kab. Jember	1787	2791	64,03	618	1050	58,86	17	70	24,29	4157	5145	80,80
10	Kab. Banyuwangi	2292	3843	59,64	555	750	74,00	11	80	13,75	3867	6797	56,89
11	Kab. Bondowoso	246	312	78,85	142	270	52,59	13	55	23,64	1810	3016	60,01
12	Kab. Situbondo	156	510	30,59	383	350	109,43	1	400	0,25	1109	1509	73,49
13	Kab. Probolinggo	249	639	38,97	464	590	78,64	27	25	108,00	2031	3367	60,32
14	Kab. Pasuruan	842	1640	51,34	451	750	60,13	8	25	32,00	1483	2000	74,15
15	Kab. Sidoarjo	1778	3564	49,89	763	1289	59,19	10	35	28,57	1231	2458	50,08
16	Kab. Mojokerto	1991	3822	52,09	842	1185	71,05	9	20	45,00	1474	3471	42,47
17	Kab. Jombang	1637	2507	65,30	517	850	60,82	10	15	66,67	1214	2489	48,77
18	Kab. Nganjuk	1833	3122	58,71	555	845	65,68	14	15	93,33	2125	3581	59,34
19	Kab. Madiun	1144	1906	60,02	286	550	52,00	12	12	100,00	1037	1580	65,63
20	Kab. Magetan	938	1833	51,17	318	370	85,95	20	25	80,00	643	828	77,66
21	Kab. Ngawi	1431	3031	47,21	230	125	184,00		5	0,00	619	1631	37,95
22	Kab. Bojonegoro	2016	4140	48,70	511	850	60,12	24	35	68,57	3133	4978	62,94
23	Kab. Tuban	1427	2328	61,30	442	810	54,57	26	40	65,00	3347	5278	63,41

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	656	1709	38,39	631	900	70,11	26	20	130,00	1270	2857	44,45
25	Kab. Gresik	899	1555	57,81	218	295	73,90	12	30	40,00	1205	2810	42,88
26	Kab. Bangkalan	247	234	105,56	262	410	63,90	1	11	9,09	614	1395	44,01
27	Kab. Sampang	136	223	60,99	199	250	79,60		5	0,00	703	1706	41,21
28	Kab. Pamekasan	158	223	70,85	167	250	66,80		5	0,00	407	1706	23,86
29	Kab. Sumenep	22	36	61,11	34	290	11,72	2	10	20,00	815	1368	59,58
30	Kota Kediri	163	258	63,18	178	385	46,23		10	0,00	145	159	91,19
31	Kota Blitar	533	864	61,69	81	155	52,26	6	60	10,00	22	71	30,99
32	Kota Malang	1761	3457	50,94	580	850	68,24	9	10	90,00	477	879	54,27
33	Kota Probolinggo	286	415	68,92	140	200	70,00	2	5	40,00	436	1338	32,59
34	Kota Pasuruan	210	228	92,11	65	65	100,00		5	0,00	272	376	72,34
35	Kota Mojokerto	429	704	60,94	226	310	72,90	6	5	120,00	81	131	61,83
36	Kota Madiun	965	1319	73,16	315	360	87,50	10	15	66,67	191	260	73,46
37	Kota Surabaya	3115	4826	64,55	1633	2165	75,43	103	400	25,75	1410	2402	58,70
38	Kota Batu	725	1161	62,45	164	230	71,30	15	20	75,00	201	565	35,58
	Jawa Timur	42.621	74.923	56,89	15.178	23.149	65,57	481	1.653	29,10	54.536	95.677	57,00

HASIL PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) MKJP TERHADAP KKP BULAN JANUARI-JULI 2019

No.	Kabupaten/Kota	KKP TOTAL MKJP	JANUARI		FEBRUARI				MARET				APRIL			
			BULAN INI		BULAN INI		S/D BLN INI		BULAN INI		S/D BLN INI		BULAN INI		S/D BLN INI	
			PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP
1	Kab. Pacitan	3227	326	10,10	242	7,50	568	17,60	212	6,57	780	24,17	279	8,65	1059	32,82
2	Kab. Ponorogo	5668	505	8,91	378	6,67	883	15,58	531	9,37	1414	24,95	516	9,10	1930	34,05
3	Kab. Trenggalek	2102	145	6,90	146	6,95	291	13,84	220	10,47	508	24,17	150	7,14	658	31,30
4	Kab. Tulungagung	4246	339	7,98	328	7,72	667	15,71	458	10,79	1125	26,50	256	6,03	1381	32,52
5	Kab. Blitar	11958	1278	10,69	1185	9,91	2463	20,60	896	7,49	3359	28,09	850	7,11	4209	35,20
6	Kab. Kediri	11082	582	5,25	501	4,52	1083	9,77	1979	17,86	3062	27,63	902	8,14	3964	35,77
7	Kab. Malang	13110	1273	9,71	1609	12,27	2882	21,98	1298	9,90	4180	31,88	1529	11,66	5709	43,55
8	Kab. Lumajang	5441	614	11,28	401	7,37	1015	18,65	506	9,30	1521	27,95	512	9,41	2033	37,36
9	Kab. Jember	9056	1001	11,05	846	9,34	1847	20,40	1279	14,12	3125	34,51	1038	11,46	4163	45,97
10	Kab. Banyuwangi	11470	1168	10,18	838	7,31	2006	17,49	1182	10,31	3242	28,27	1096	9,56	4337	37,81
11	Kab. Bondowoso	3653	281	7,69	686	18,78	967	26,47	454	12,43	1453	39,78	371	10,16	1824	49,93
12	Kab. Situbondo	2769	212	7,66	257	9,28	469	16,94	578	20,87	1047	37,81	314	11,34	1385	50,02
13	Kab. Probolinggo	4621	487	10,54	433	9,37	923	19,97	579	12,53	1502	32,50	745	16,12	2247	48,63
14	Kab. Pasuruan	4415	376	8,52	368	8,34	744	16,85	409	9,26	1153	26,12	446	10,10	1671	37,85
15	Kab. Sidoarjo	7346	438	5,96	523	7,12	961	13,08	857	11,67	1818	24,75	552	7,51	2370	32,26
16	Kab. Mojokerto	8498	562	6,61	734	8,64	1296	15,25	866	10,19	2162	25,44	645	7,59	2807	33,03
17	Kab. Jombang	5861	451	7,69	361	6,16	812	13,85	539	9,20	1351	23,05	497	8,48	1848	31,53
18	Kab. Nganjuk	7563	573	7,58	487	6,44	1067	14,11	693	9,16	1760	23,27	927	12,26	2696	35,65
19	Kab. Madiun	4048	318	7,86	334	8,25	653	16,13	376	9,29	1031	25,47	360	8,89	1391	34,36
20	Kab. Magetan	3056	199	6,51	263	8,61	462	15,12	288	9,42	750	24,54	296	9,69	1046	34,23
21	Kab. Ngawi	4792	292	6,09	266	5,55	558	11,64	287	5,99	845	17,63	377	7,87	1222	25,50
22	Kab. Bojonegoro	10003	929	9,29	1006	10,06	1935	19,34	1101	11,01	3047	30,46	802	8,02	3849	38,48
23	Kab. Tuban	8456	1023	12,10	1040	12,30	2063	24,40	682	8,07	2745	32,46	674	7,97	4437	52,47

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24	Kab. Lamongan	5486	571	10,41	387	7,05	958	17,46	297	5,41	1255	22,88	410	7,47	1665	30,35
25	Kab. Gresik	4690	529	11,28	351	7,48	880	18,76	377	8,04	1257	26,80	392	8,36	1649	35,16
26	Kab. Bangkalan	2050	175	8,54	148	7,22	323	15,76	178	8,68	501	24,44	159	7,76	660	32,20
27	Kab. Sampang	2184	189	8,65	146	6,68	331	15,16	129	5,91	483	22,12	206	9,43	693	31,73
28	Kab. Pamekasan	2184	90	4,12	102	4,67	192	8,79	111	5,08	303	13,87	130	5,95	433	19,83
29	Kab. Sumenep	1704	87	5,11	23	1,35	110	6,46	294	17,25	404	23,71	193	11,33	597	35,04
30	Kota Kediri	812	82	10,10	66	8,13	148	18,23	82	10,10	230	28,33	92	11,33	322	39,66
31	Kota Blitar	1150	94	8,17	70	6,09	164	14,26	106	9,22	270	23,48	91	7,91	361	31,39
32	Kota Malang	5196	395	7,60	526	10,12	921	17,73	351	6,76	1272	24,48	360	6,93	1632	31,41
33	Kota Probolinggo	1958	116	5,92	232	11,85	348	17,77	122	6,23	470	24,00	95	4,85	565	28,86
34	Kota Pasuruan	674	71	10,53	175	25,96	246	36,50	66	9,79	312	46,29	65	9,64	377	55,93
35	Kota Mojokerto	1150	99	8,61	101	8,78	200	17,39	106	9,22	306	26,61	106	9,22	412	35,83
36	Kota Madiun	1954	207	10,59	188	9,62	395	20,21	230	11,77	625	31,99	275	14,07	890	45,55
37	Kota Surabaya	9793	991	10,12	826	8,43	1817	18,55	778	7,94	2800	28,59	1032	10,54	3948	40,31
38	Kota Batu	1976	127	6,43	240	12,15	367	18,57	145	7,34	512	25,91	162	8,20	674	34,11
	Jawa Timur	19.5402	17.195	8,80	16.813	8,60	34.015	17,41	19.642	10,05	53.980	27,63	17.902	9,16	73.114	37,42

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.	Kabupaten/Kota	KKP TOTAL MKJP	MEI				JUNI				JULI			
			BULAN INI		S/D BLN INI		BULAN INI		S/D BLN INI		BULAN INI		S/D BLN INI	
			PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP	PB MKJP	% KKP
1	Kab. Pacitan	3227	166	5,14	1229	38,08	191	5,92	1420	44,00	276	8,55	1696	52,56
2	Kab. Ponorogo	5668	456	8,05	2386	42,10	399	7,04	2785	49,14	447	7,89	3232	57,02
3	Kab. Trenggalek	2102	115	5,47	773	36,77	122	5,80	895	42,58	240	11,42	1135	54,00
4	Kab. Tulungagung	4246	232	5,46	1613	37,99	247	5,82	1860	43,81	649	15,28	2509	59,09
5	Kab. Blitar	11958	620	5,18	4829	40,38	621	5,19	5455	45,62	911	7,62	6366	53,24
6	Kab. Kediri	11082	429	3,87	4393	39,64	851	7,68	5244	47,32	1615	14,57	6859	61,89
7	Kab. Malang	13110	737	5,62	6446	49,17	610	4,65	7056	53,82	1129	8,61	8185	62,43
8	Kab. Lumajang	5441	241	4,43	2274	41,79	162	2,98	2436	44,77	438	8,05	2869	52,73
9	Kab. Jember	9056	627	6,92	4790	52,89	672	7,42	5462	60,31	1117	12,33	6579	72,65
10	Kab. Banyuwangi	11470	829	7,23	5166	45,04	674	5,88	5840	50,92	885	7,72	6725	58,63
11	Kab. Bondowoso	3653	135	3,70	1959	53,63	95	2,60	2054	56,23	157	4,30	2211	60,53
12	Kab. Situbondo	2769	29	1,05	1414	51,07	15	0,54	1429	51,61	215	7,76	1649	59,55
13	Kab. Probolinggo	4621	171	3,70	2418	52,33	153	3,31	2571	55,64	200	4,33	2771	59,97
14	Kab. Pasuruan	4415	262	5,93	1971	44,64	369	8,36	2341	53,02	443	10,03	2784	63,06
15	Kab. Sidoarjo	7346	364	4,96	2734	37,22	451	6,14	3185	43,36	597	8,13	3782	51,48
16	Kab. Mojokerto	8498	498	5,86	3305	38,89	608	7,15	3795	44,66	521	6,13	4316	50,79
17	Kab. Jombang	5861	523	8,92	2371	40,45	505	8,62	2876	49,07	502	8,57	3378	57,64
18	Kab. Nganjuk	7563	395	5,22	3091	40,87	470	6,21	3561	47,08	966	12,77	4527	59,86
19	Kab. Madiun	4048	280	6,92	1680	41,50	271	6,69	1951	48,20	528	13,04	2479	61,24
20	Kab. Magetan	3056	179	5,86	1225	40,09	199	6,51	1424	46,60	495	16,20	1919	62,79
21	Kab. Ngawi	4792	295	6,16	1517	31,66	235	4,90	1752	36,56	528	11,02	2280	47,58
22	Kab. Bojonegoro	10003	550	5,50	4399	43,98	528	5,28	4927	49,26	761	7,61	5684	56,82
23	Kab. Tuban	8456	520	6,15	3939	46,58	407	4,81	4346	51,40	896	10,60	5242	61,99
24	Kab. Lamongan	5486	142	2,59	1807	32,94	354	6,45	2161	39,39	422	7,69	2583	47,08
25	Kab. Gresik	4690	167	3,56	1816	38,72	220	4,69	2036	43,41	283	6,03	2334	49,77
26	Kab. Bangkalan	2050	157	7,66	825	40,24	99	4,83	924	45,07	200	9,76	1124	54,83

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

27	Kab. Sampang	2184	73	3,34	766	35,07	101	4,62	872	39,93	160	7,33	1038	47,53
28	Kab. Pamekasan	2184	90	4,12	523	23,95	73	3,34	596	27,29	136	6,23	732	33,52
29	Kab. Sumenep	1704	46	2,70	640	37,56	89	5,22	732	42,96	141	8,27	873	51,23
30	Kota Kediri	812	76	9,36	398	49,01	0	0,00	398	49,01	88	10,84	486	59,85
31	Kota Blitar	1150	101	8,78	462	40,17	85	7,39	547	47,57	95	8,26	642	55,83
32	Kota Malang	5196	372	7,16	2057	39,59	221	4,25	2278	43,84	460	8,85	2827	54,41
33	Kota Probolinggo	1958	83	4,24	656	33,50	87	4,44	743	37,95	121	6,18	864	44,13
34	Kota Pasuruan	674	58	8,61	435	64,54	51	7,57	486	72,11	61	9,05	547	81,16
35	Kota Mojokerto	1150	92	8,00	504	43,83	95	8,26	599	52,09	143	12,43	742	64,52
36	Kota Madiun	1954	196	10,03	1086	55,58	175	8,96	1261	64,53	220	11,26	1481	75,79
37	Kota Surabaya	9793	739	7,55	4693	47,92	675	6,89	5368	54,81	891	9,10	6261	63,93
38	Kota Batu	1976	146	7,39	820	41,50	152	7,69	972	49,19	133	6,73	1105	55,92
	Jawa Timur	19.5402	11.191	5,73	83.410	42,69	11.332	5,80	94.638	48,43	18.070	9,25	11.2816	57,74